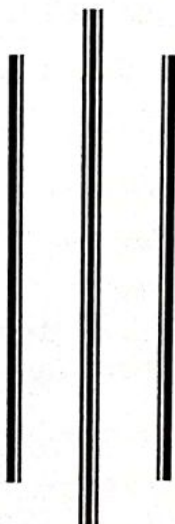


**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (PERUBAHAN KUA)
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
2021**

DAFTAR ISI

KABUPATEN KAMPAR	2
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM	2
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PERUBAHAN KUA) TAHUN ANGGARAN 2021	2
BAB I.....	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA);.....	2
1.2 Tujuan penyusunan Perubahan KUA; dan.....	3
1.3 Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA.....	4
BAB II.....	1
KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH.	1
2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah	1
2.2 Arah kebijakan keuangan daerah.....	31
BAB III.....	33
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	33
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	33
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	33
BAB IV.....	50
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	50
4.1 Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2021	50
4.2 Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	53
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah	53
4.2.2 Pendapatan Transfer.....	54
4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	55
BAB V	56
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	56
5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja	56
5.1 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.....	58
BAB VI.....	61
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	61
6.1 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan	61
6.2 Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan	62
BAB VII	63
STRATEGI PENCAPAIAN.....	63
BAB VIII.....	64
PENUTUP.	64

KABUPATEN KAMPAR
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PERUBAHAN KUA)
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA);

PerKebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU A) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kabupaten Kampar Tahun 2021 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021. RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (topdown/bottom up) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam pelaksanaan kebijakan umum yang tertuang dalam APBD terjadi beberapa kondisi yang menyebabkan harus dilakukan perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan KUA yang telah ditetapkan baik dari segi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dapat berupa terjadinya: a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 162 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar pada pelaksanaan APBD tahun 2021 telah melakukan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan

anggaran yang tidak sesuai dengan KUA tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui pergeseran dan perubahan anggaran mendahului perubahan APBD tahun 2021. Perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021. Perubahan mendahului ini selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD 2021.

Selanjutnya beberapa program dan kegiatan serta sub kegiatan pada SKPD dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021 perlu dilakukan perubahan dan pergeseran dalam pencapaian target dan sasaran. Perubahan ini mencakup pergeseran rekening, penambahan dan/atau pengurangan anggaran, perubahan lokasi kegiatan dan juga penambahan kegiatan baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu dilakukan perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2021.

1.2 Tujuan penyusunan Perubahan KUA; dan

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 bertujuan untuk :

1. Menyusun perubahan kebijakan ekonomi daerah, perubahan kebijakan keuangan daerah, perubahan kebijakan asumsi dasar, perubahan kebijakan pendapatan, perubahan kebijakan belanja, perubahan kebijakan pembiayaan daerah;
2. Menyusun strategi pencapaian yang memuat langkah-langkah konkrit yang akan dilaksanakan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
3. Menyusun Perubahan KUAPBD sebagai Pedoman yang digunakan dalam Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya dijadikan pedoman dan panduan bagi seluruh Perangkat Daerah untuk

menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2021.

1.3 Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA.

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Kampar tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 44);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tahun 2017-2022 (Lampiran Daerah Kabupaten Lampung Tahun 2020 Nomor 1).
12. Peraturan Bupati Lampung Nomor Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tahun 2021 Nomor).

BAB II
KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi dan tenaga kerja. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai rencana target makro ekonomi daerah Tahun 2020 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, perkiraan PDRB harga berlaku dan harga konstan.

2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah

Sesuai dengan arahan Nasional dibidang ekonomi, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun RKP Nasional, begitu pula terhadap RKP Provinsi dan Kabupaten. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program pembangunan dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Secara umum gambaran tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan ekonomi Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 1 Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Ekonomi Nasional, Provinsi Riau, dan Kabupaten Kampar

Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Ekonomi		
Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar
Tema Awal:	Tema Awal :	Tema Awal :
Meningkatkan industri, pariwisata, dan investasi di berbagai wilayah didukung oleh sumberdaya manusia dan infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas	Memantapkan pengembangan industri, pertanian, pariwisata, yang mendorong perdagangan dan jasa untuk meningkatkan daya saing ekonomi	Memacu investasi dan sinergitas antar sektor serta dunia usaha dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Tema Penyesuaian:	Tema Penyesuaian:	Tema Penyesuaian:
Mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan reformasi	Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial melalui pemantapan	Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial untuk kehidupan normal yang baru, dengan

sosial dengan fokus : 1. Pemulihan industri, pariwisata dan investasi; 2. Reformasi sistem kesehatan Nasional 3. Reformasi sistem Jaring Pengaman Nasional; 4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.	pengembangan industri, pertanian, pariwisata, yang mendorong perdagangan dan jasa dengan lima prioritas pembangunan daerah yaitu : 1. Pengembangan industri 2. Pengembangan pertanian 3. Pengembangan pariwisata 4. Pengembangan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Pengembangan SDM yang beriman, berkualitas dan berdaya saing.	fokus : 1. Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi 2. Memperkuat sistim kesehatan daerah 3. Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing 4. Pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi 5. Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan
--	--	---

Berdasarkan uraian terhadap tema pembangunan daerah tahun 2021 yang telah disusun dalam tabel 2.1 di atas, selanjutnya akan diuraikan keterkaitan antara prioritas kebijakan pembangunan daerah tersebut sebagaimana disajikan pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2 2 Uraian Keterkaitan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Ekonomi Nasional, Provinsi Riau, dan Kabupaten Kampar

Uraian Keterkaitan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Ekonomi		
Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar
Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Mendorong transformasi ekonomi ke arah hilirisasi industri yang mengolah hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan	Pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi
<ul style="list-style-type: none"> - Subsidi listrik untuk rumah tangga dan IKM - Pembagian konverter KIT bagi nelayan dan petani - Konversi minyak tanah ke LPG Pembangunan "strategic reserves" untuk minyak mentah - Pembangunan energi terbarukan - Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan produksi hasil industri - Memperbaiki iklim dan promosi Investasi - Dukungan Infrastruktur - Revitaliasi dan kemitraan Industri Kecil Menengah dan Koperasi - Hilirisasi industri yang mengolah hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan pertambangan - Pemulihan produktivitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan efektivitas pengembangan desa mandiri pangan - Pembaharuan data ketersediaan dan cadangan pangan - Peningkatan diseminasi teknologi terbaru di bidang produksi dan pengendalian penyakit melalui beragam metode penyuluhan - Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi dan teknologi industri - Pengembangan sentra-sentra

Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar
<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan pembangunan smelter - Pelaksanaan omnibus law cipta lapangan kerja - Percepatan realisasi investasi skala besar - Perluasan positive lists investasi - Percepatan integrasi sistem perizinan - Penyediaan layanan debottlenecking dan aftercare investasi - Rehiring dan re-training tenaga kerja - Pemulihan produktivitas (bahan baku, energi, permesinan) - Akselerasi industri substitusi impor - Peningkatan penggunaan dalam negeri - Peningkatan ekspor - Peningkatan efisiensi logistik - Percepatan kawasan industri prioritas - Revitaliasi dan kemitraan untuk IKM - Transformasi industri 4.0 - Insentif wisman dan wisnus - Penyelenggaraan event nasional dan internasional - Percepatan pembangunan infrastruktur - Standar kebersihan dan keselamatan - Diversifikasi destinasi dan atraksi wisata - Fasilitasi akses ke pembiayaan - Kerja sama rantai pasok pariwisata - Pelatihan-sertifikasi-penempatan SDM - Penumbuhan usaha kreatif/start-up 	<p>(bahan baku, energi, permesinan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Percepatan kawasan industri prioritas - Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau - Meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata - Meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata - Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu - Penyelenggaraan event tradisional dan nasional - Percepatan pembangunan infrastruktur - Diversifikasi destinasi dan atraksi - Kerja sama pariwisata dan kebudayaan - Penumbuhan usaha ekonomi kreatif 	<p>industri potensial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi melalui pening-katan pelayanan perijinan dan pemberian insentif - Peningkatan promosi dan kerja sama investasi melalui pameran, roadshow dan event-event lainnya - Peningkatan daya tarik wisata, jumlah pelaku usaha industri pariwisata dan jumlah SDM pengelola pariwisata - Peningkatan upaya pemasaran pariwisata - Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan BUMDES dalam peningkatan perekonomian masyarakat - Peningkatan perlindungan kosumen, pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang - Pembaharuan data ketersediaan dan cadangan pangan - Peningkatan efektivitas pengembangan desa mandiri pangan - Peningkatan diseminasi teknologi terbaru di bidang produksi dan pengendalian penyakit melalui beragam metode penyuluhan - Peningkatan akses dan kesempatan kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha seperti pelaksanaan jobfair
<p>Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan</p>	<p>Pengembangan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan</p>	<p>Memperkuat sistem kesehatan daerah</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Mempercepat operasionalisasi kawasan didukung pembangunan infrastruktur - Mendorong pengembangan industri substitusi impor, 	<ul style="list-style-type: none"> - Memantapkan jalan dan jembatan - Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh - Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan fasilitas dan standarisasi pelayanan kesehatan dasar meliputi sarana dan prasarana, mutu tenaga kesehatan, mutu manajemen pelayanan, jaminan kesehatan nasional, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar
<p>memperluas pasar ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan bahan baku lokal serta rantai pasok industri lokal - Memperhatikan tenaga kerja yang terdampak Covid-19 - Mempercepat realisasi investasi pada kawasan - Mengoptimalkan paket-paket insentif fiskal dan non fiskal - Mempercepat operasionalisasi kawasan, memperhatikan amenities dan keberagaman atraksi, didukung dengan pembangunan infrastruktur - Penyelenggaraan event-event pariwisata skala nasional dan internasional - Memperhatikan tenaga kerja yang terdampak Covid-19 pada kawasan - Meningkatkan kerjasama antara BU, Pemda, dan masyarakat sebagai upaya pelibatan masyarakat dan peningkatan aktivitas industri kreatif - Mempercepat realisasi investasi pada kawasan - Mengoptimalkan paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal - Peningkatan produksi komoditas unggulan dengan nilai tambah tinggi yang sesuai dengan kebutuhan industri substitusi impor dan mampu meningkatkan ekspor - Pengarusutamaan pendekatan kota cerdas serta dukungan bagi kegiatan bekerja sesuai dengan standar keamanan masa pandemi Covid-19 - Penguatan peran pendamping desa dan penajaman prioritas penggunaan Dana Desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa - Pengembangan produksi dan pengolahan nilai 	<ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi sektor industri, pariwisata dan investasi - Infrastruktur untuk mendukung penguatan kesehatan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular - Pengembangan promosi kesehatan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, keluarga berencana dan lingkungan sehat - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD

Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar
<p>tambah komoditas unggulan bernilai ekonomis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan teknologi informasi - Penguatan Sistem Informasi Desa - Penguatan kapasitas SDM, kelem-bagaan, dan kolaborasi para pihak - Pengarahan terhadap Pemda untuk fokus pada perencanaan dan penganggaran penanganan dampak dari pasca pandemi Covid-19 - Penguatan data kependudukan daerah terdampak pandemi Covid-19 - Harmonisasi regulasi pusat & daerah - Mengoptimalkan pemanfaatan TKDD 		
<p>Sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing</p>	<p>Meningkatkan kualitas dan kesiapan sumber daya manusia untuk mendukung industrialisasi</p>	<p>Pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan - Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial - Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan - Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas - Meningkatkan perlindungan anak dan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan berwirausaha - Memperluas akses penduduk miskin rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif - Meningkatkan produktivitas & daya saing - Memperkuat sistem kesehatan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan dasar pendidikan - Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan - Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik - Meningkatkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas - Meningkatkan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan keolahragaan - Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan - Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan - Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal - Pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan melalui latihan berkala dan merata, serta penguatan KKG (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) - Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan melalui pengembangan manajemen mutu dan penerapan teknologi informasi - Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat dan sarana peningkatan minat baca masyarakat - Meningkatkan pembinaan olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan - Peningkatan kehidupan antar umat beragama yang harmonis melalui peningkatan wawasan kebangsaan dan politik

Uraian Keterkaitan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Ekonomi

Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar
<p>untuk: kesiapan menghadapi pandemi dan PHEIC (Public Health Emergency of International Concern), recovery & penyelesaian masalah kesehatan, penguatan promotif dan preventif, serta peningkatan anggaran kesehatan pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Germas: air bersih, sanitasi, cuci tangan pakai sabun, olahraga, kesehatan lingkungan, kawasan sehat, dan pengelolaan limbah medis - Penguatan sumber daya: fasilitas, farmasi, alkes, dan SDM kesehatan di Rumah Sakit, sistem rujukan dan Puskesmas - Penguatan health security: prevent, detect, response: 1) pos pintu masuk (KKP); 2) sistem peringatan dini (alert system); 3) surveilans penyakit real time, kapasitas dan jejaring laboratorium, kapasitas SDM, protokol dan tata laksana respons cepat, litbang; 4) perluasan case detection, skrining, dan karantina kesehatan - Veri-Vali DTKS dengan NIK (300 kab/kota) - Pengembangan layanan terpadu kemiskinan (300 kab/kota) - Integrasi adminduk pada DTKS (100%) - Bantuan sosial terintegrasi 5T (50%) - Penyaluran bantuan tunai bersyarat (PKH) dan bantuan pangan (Program Sembako) - Penyaluran bantuan pendidikan (PIP dan PIP Kuliah) - Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik - Diklat peningkatan kemampuan keluarga (Pendampingan) - Penyediaan layanan infrastruktur dan internet - Memperluas pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat - Meningkatkan pembangunan dan pelayanan sarana keagamaan - Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin - Peningkatan pelayanan dasar kesehatan - Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa - Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan - Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 	<p>masyarakat serta peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatkan upaya pelestarian seni tradisional dan cagar budaya yang dimiliki - Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial - Peningkatkan perlindungan anak dan peran serta perempuan dalam pembangunan melalui keserasian kebijakan dan penguatan kelembagaan - Pengendalian penduduk dan KB - Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur - Peningkatan upaya menciptakan ketenteraman, ketertiban umum dan penanggulangan pasca bencana - Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan perkantoran berbasis sistem elektronik - Peningkatan fungsi dan peran DPRD terutama dalam pembentukan peraturan daerah

mengidentifikasi kebutuhan
 mahasiswa terkait dengan
 masalah dan mencari
 solusi
 mengidentifikasi cara belajar
 mahasiswa, serta metode
 pembelajaran, serta
 materi yang akan diajarkan
 sehingga dapat meningkatkan
 kualitas pembelajaran
 mahasiswa yang
 berkualitas dengan
 menggunakan pendekatan
 yang berorientasi pada
 hasil belajar (outcome
 based) dan menggunakan
 metode pembelajaran
 yang inovatif dan kreatif
 serta menggunakan
 media pembelajaran yang
 inovatif dan kreatif
 serta menggunakan
 metode pembelajaran yang
 inovatif dan kreatif
 serta menggunakan
 metode pembelajaran yang
 inovatif dan kreatif

Mengembangkan
 kemampuan literasi kefarmasian
 melalui media sosial dalam
 upaya meningkatkan
 kemampuan literasi
 masyarakat untuk
 meningkatkan kualitas
 hidup dan kesejahteraan

Mengembangkan
 kemampuan komunikasi dan
 kerjasama tim dalam
 upaya meningkatkan
 kemampuan literasi
 masyarakat untuk
 meningkatkan kualitas
 hidup dan kesejahteraan

Mengembangkan
 kemampuan literasi kefarmasian
 melalui media sosial dalam
 upaya meningkatkan
 kemampuan literasi
 masyarakat untuk
 meningkatkan kualitas
 hidup dan kesejahteraan

Mengembangkan kemampuan literasi kefarmasian melalui media sosial dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan

Mengembangkan kemampuan literasi kefarmasian melalui media sosial dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan

Mengembangkan kemampuan literasi kefarmasian melalui media sosial dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan

Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar
<p>Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan pencemaran dan kerusakan SDA dan lingkungan hidup - Penanggulangan pencemaran dan Kerusakan SDA dan LH - Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan SDA dan LH - Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup - Penanggulangan bencana - Peningkatan Ketahanan Iklim - Pembangunan energi berkelanjutan - Pemulihan lahan berkelanjutan KP3 - Penanganan limbah - Pengembangan industri hijau - Rendah karbon pesisir dan laut - Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 - Penguatan sistem peringatan dini bencana (alam dan non alam) 		<p>Pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan armada dan tenaga pengangkutan sampah ke TPA dan pengembangan TPS 3R - Peningkatan persentase luasan ruang terbuka hijau melalui pembangunan hutan dan taman kota - Pengadaan sarana dan prasarana pengontrol dan pengendali pencemaran air dan udara - Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dan pengembangan sistem informasi pertanahan - Peningkatan monitoring dan penegakkan hukum terhadap tingkat kepatuhan RTRW
<p>Stabilitas Politik dan transformasi pelayanan publik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan kapasitas lembaga demokrasi - Penguatan kesetaraan & kebebasan - Peningkatan kualitas komunikasi publik - Penataan regulasi - Perbaikan sistim hukum pidana & perdata - Penguatan sistim anti korupsi - Peningkatan akses terhadap keadilan - Penguatan implementasi manajemen ASN - Transformasi pelayanan publik - Penataan kelembagaan dan proses bisnis - Reformasi sistim akuntabilitas kinerja - Penguatan keamanan dalam negeri - Peningkatan 		

Urutan Keterkaitan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Ekonomi Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar
<p>kemampuan pertahanan dibarengi confidence building measure</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan keamanan laut - Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat - Penguatan ketahanan dan keamanan siber - Sosialisasi dan diseminasi informasi perkembangan, penanganan, dan pemulihan Covid-19 secara merata dan berkeadilan melalui berbagai media di pusat dan daerah - Pengembangan teknologi pemilu (e-rekap & e-voting) - Pendampingan dan pemberian bantuan terhadap WNI di luar negeri yang terdampak pandemi Covid19 - Inisiasi kerja sama pembangunan menggunakan kerangka KSST di bidang kesehatan, antara lain pengembangan diagnostic KIT dan vaksin - Pelaksanaan knowledge sharing kebijakan atau praktik unggulan penanggulangan pandemi Covid-19; - Optimalisasi proses penanganan perkara dalam sistem peradilan secara elektronik - Optimalisasi upaya penyelesaian perkara melalui alternatif penyelesaian sengketa dan penangguhan penahanan - Optimalisasi pelaksanaan asimilasi dan reintegrasi warga binaan pemasyarakatan dalam rangka pengurangan kelebihan kapasitas - Percepatan pemulihan sektor usaha melalui optimalisasi sistem kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU) 		

Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar
<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan pelayanan publik secara terpadu - Penerapan pelayanan publik secara daring/elektronik (e-service) terutama untuk layanan dasar dan perijinan. - Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan kemhan/TNI dan Polri serta peningkatan OMSP penanggulangan bencana serta kontigensi 		

Perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Kampar selain bertujuan untuk mencapai sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi. Pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan upaya memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Selain itu, kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yaitu peningkatan ekonomi berdaya saing dan kesejahteraan rakyat. Perkembangan perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah lain yang berada di sekitar Kabupaten Kampar. Faktor internal yang diupayakan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian, peningkatan daya saing daerah dengan keunggulan perekonomian yang dilandasi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain dari pada itu faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kestabilan kondisi sosial dan politik, diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian daerah.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2013-2021

Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Salah satu indikator utama yang dijadikan sebagai ukuran perkembangan pembangunan suatu wilayah

adalah pertumbuhan ekonomi. Perekonomian merupakan suatu aktivitas yang akan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan para pelakunya. Kemakmuran yang meningkat bisa dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro dan sosialnya, sehingga dapat terukur bagaimana perekonomian tersebut meningkat atau tidak. Salah satu kondisi makro ekonomi ini digambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara umum dibagi ke dalam nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. Kondisi PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku sampai dengan tahun 2021 diperkirakan masih akan lebih dominan pada sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi dan perdagangan. Secara nominal, keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku akan mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021. Nilai PDRB secara keseluruhan pada tahun 2013 sebesar Rp 61.515,51 miliar sedangkan di tahun 2021 diperkirakan akan terus meningkat sebesar Rp.87.833,83 miliar. Gambaran lengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 2.3 PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 - 2021 (Miliar Rupiah)

No.	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,636.65	15,347.66	16,483.57	18,200.03	19,589.82	20,308.25	22,117.47	23,565.75	25,148.04
2	Pertambangan dan Penggalian	28,026.21	31,556.99	25,993.64	25,737.54	24,678.05	28,311.58	25,734.74	26,008.31	26,325.81
3	Industri Pengolahan	12,524.98	13,519.61	14,565.37	15,572.00	16,674.49	17,000.88	18,714.60	19,858.38	21,104.95
4	Pengadaan Listrik dan Gas	16.31	20.84	28.33	34.42	40.84	44.16	49.10	54.45	60.49
5	Air, Sampah dan Limbah	3.08	3.19	3.55	3.63	3.87	3.91	4.12	4.26	4.40
6	Konstruksi	3,371.88	3,837.04	4,305.28	4,795.22	5,091.36	5,439.62	6,064.98	6,620.78	7,238.78
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1,547.85	1,921.93	2,067.90	2,277.15	2,433.99	2,606.23	2,959.38	3,237.22	3,546.66
8	Transportasi dan Pergudangan	142.29	156.83	183.86	202.87	218.38	237.62	269.57	293.70	320.50
9	Akomodasi, Makan dan Minum	43.23	47.05	52.19	58.92	62.24	65.71	72.82	78.18	84.07
10	Informasi dan Komunikasi	209.93	226.22	246.01	253.60	272.57	287.47	319.48	338.57	359.36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	221.94	257.66	260.47	283.09	298.83	322.67	337.75	361.79	388.14
12	Real Estat	475.33	539.26	594.53	645.80	675.30	708.78	781.85	836.70	896.80
13	Jasa Perusahaan	1.68	1.98	2.16	2.37	2.51	2.67	3.05	3.32	3.63
14	Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	847.06	870.97	907.46	961.78	1,030.10	1,089.34	1,191.87	1,247.94	1,308.68
15	Jasa Pendidikan	236.78	261.17	299.40	330.23	356.47	385.86	436.52	472.54	512.34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	78.13	91.50	115.99	124.71	129.92	135.77	161.21	178.12	197.10
17	Jasa Lainnya	132.18	157.01	175.45	192.90	212.29	236.32	271.43	300.90	334.08
PDRB dengan Migas		61,515.51	68,816.91	66,285.16	69,676.26	71,771.03	77,186.84	79,489.94	83,460.91	87,883.53

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2020 (2020* - 2021* Angka Estimasi)

Perekonomian Kabupaten Kampar bisa dilihat dari kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap PDRB. Kontribusi ini bisa mencerminkan bagaimana struktur ekonomi di wilayah Kabupaten Kampar. Tabel 3.3 menggambarkan kontribusi dari tiap sektor ekonomi. Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dalam menyumbang PDRB di Kabupaten Kampar, dengan sub sektor perkebunan sebagai kontributor terbesar kepada sektor pertanian. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa struktur ekonomi dari Kabupaten Kampar merupakan pertanian dengan kekuatan pada sub sektor perkebunan. Hal menarik lain dari kontributor ekonomi terbesar adalah sumbangan sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Selanjutnya sektor terendah yang memberikan kontribusi terhadap PDRB adalah sektor listrik dan gas, air, sampah dan limbah, akomodasi, makan dan minum, serta jasa perusahaan. Perkembangan dari tahun 2013 sampai dengan estimasi tahun 2020 dan 2021 memperlihatkan persentase yang relatif stabil, dengan kata lain struktur ekonomi untuk sektor ini sedikit sekali mengalami perubahan.

Berdasarkan hasil estimasi, juga diperkirakan kontribusi sektor terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 akan mengalami peningkatan. Distribusi sektor yang mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya adalah sektor pertambangan sebesar 29,97%. Selanjutnya adalah pertanian masih akan tetap dominan sebesar 28,63%, dengan komoditas terbesar adalah perkebunan kelapa sawit dan karet. Sedangkan untuk sektor berikutnya adalah industri pengolahan sebesar 24,03%, konstruksi 8,24%, dan perdagangan 4,04%. Estimasi untuk sektor listrik dan gas, air dan limbah, akomodasi dan makanan, serta jasa perusahaan juga masih tetap akan stabil sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2 4 . Distribusi PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2021 (Persen)

Sektor	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22.17	22.30	24.87	26.12	27.29	26.31	27.82	28.24	28.63
2 Pertambangan dan Penggalian	45.56	45.86	39.21	36.94	34.38	36.68	32.37	31.16	29.97
3 Industri Pengolahan	20.36	19.65	21.97	22.35	23.23	22.03	23.54	23.79	24.03

4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07
5	Air, Sampah dan Limbah	0.01	0.005	0.01	0.01	0.01	0.01	0.005	0.005	0.005
6	Konstruksi	5.48	5.58	6.50	6.88	7.09	7.05	7.63	7.93	8.24
7	Perdagangan Besar dan Eceran	2.52	2.79	3.12	3.27	3.39	3.38	3.72	3.88	4.04
8	Transportasi dan Pergudangan	0.23	0.23	0.28	0.29	0.30	0.31	0.34	0.35	0.36
9	Akomodasi, Makan dan Minum	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10
10	Informasi dan Komunikasi	0.34	0.33	0.37	0.36	0.38	0.37	0.40	0.41	0.41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.36	0.37	0.39	0.41	0.42	0.42	0.42	0.43	0.44
12	Real Estat	0.77	0.78	0.90	0.93	0.94	0.92	0.98	1.00	1.02
13	Jasa Perusahaan	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
14	Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	1.38	1.27	1.37	1.38	1.44	1.41	1.50	1.50	1.49
15	Jasa Pendidikan	0.38	0.38	0.45	0.47	0.50	0.50	0.55	0.57	0.58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.13	0.13	0.17	0.18	0.18	0.18	0.20	0.21	0.22
17	Jasa Lainnya	0.21	0.23	0.26	0.28	0.30	0.31	0.34	0.36	0.38
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2020 (2020* - 2021* Angka Estimasi)

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kampar berikutnya adalah berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, sebagai alternatif lain dalam melihat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan PDRB riil. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Kabupaten Kampar juga masih sangat didominasi oleh sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi ini ditunjukkan oleh peranan sektor pertanian yang diperkirakan masih cukup dominan mempengaruhi pertumbuhan pembangunan sektor ekonomi selain minyak dan gas, terutama untuk subsektor perkebunan.

Tabel 2.5 PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2013-2021 (Miliar Rupiah)

No	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,636.65	15,347.66	16,483.57	18,200.03	19,589.82	20,308.25	22,117.47	23,565.75	25,148.04
2	Pertambangan dan Penggalian	28,026.21	31,556.99	25,993.64	25,737.54	24,678.05	28,311.58	25,734.74	26,008.31	26,325.81
3	Industri Pengolahan	12,524.98	13,519.61	14,565.37	15,572.00	16,674.49	17,000.88	18,714.60	19,858.38	21,104.95
4	Pengadaan Listrik dan Gas	16.31	20.84	28.33	34.42	40.84	44.16	49.10	54.45	60.49
5	Air, Sampah dan Limbah	3.08	3.19	3.55	3.63	3.87	3.91	4.12	4.26	4.40
6	Konstruksi	3,371.88	3,837.04	4,305.28	4,795.22	5,091.36	5,439.62	6,064.98	6,620.78	7,238.78
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1,547.85	1,921.93	2,067.90	2,277.15	2,433.99	2,606.23	2,959.38	3,237.22	3,546.66
8	Transportasi dan Pergudangan	142.29	156.83	183.86	202.87	218.38	237.62	269.57	293.70	320.50
9	Akomodasi, Makan dan Minum	43.23	47.05	52.19	58.92	62.24	65.71	72.82	78.18	84.07
10	Informasi dan Komunikasi	209.93	226.22	246.01	253.60	272.57	287.47	319.48	338.57	359.36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	221.94	257.66	260.47	283.09	298.83	322.67	337.75	361.79	388.14
12	Real Estat	475.33	539.26	594.53	645.80	675.30	708.78	781.85	836.70	896.80
13	Jasa Perusahaan	1.68	1.98	2.16	2.37	2.51	2.67	3.05	3.32	3.63
14	Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	847.06	870.97	907.46	961.78	1,030.10	1,089.34	1,191.87	1,247.94	1,308.68
15	Jasa Pendidikan	236.78	261.17	299.40	330.23	356.47	385.86	436.52	472.54	512.34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	78.13	91.50	115.99	124.71	129.92	135.77	161.21	178.12	197.10
17	Jasa Lainnya	132.18	157.01	175.45	192.90	212.29	236.32	271.43	300.90	334.08
PDRB dengan Migas		61,515.51	68,816.91	66,485.16	69,676.26	71,771.03	77,186.84	79,489.94	83,460.91	87,833.83

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2020 (Tahun 2020* - 2021* Angka Estimasi)

Berdasarkan tabel 3.4, perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 diperkirakan akan terus menunjukkan peningkatan. Jika di tahun 2013 nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar Rp 44.297,58 miliar, maka perkiraan angkanya di tahun 2021 akan meningkat sebesar Rp 55.238,22 miliar. Kontribusi sektor yang paling dominan adalah pertanian dengan nilainya sebesar Rp 12.380,41 miliar (27,95%) di tahun 2013, sedangkan estimasi perkembangannya di tahun 2021 nilainya diperkirakan akan meningkat sebesar Rp 17.628,09 miliar (31,91%). Selanjutnya distribusi perkembangan sektor yang paling dominan lainnya adalah industri pengolahan dengan nilai Rp 11.966,08 miliar (27,01%) di tahun 2013 dan diperkirakan semula akan meningkat sebesar Rp 16.904,14 miliar (32,21%) tahun 2021, namun karena terjadi bencana berupa pandemic Coronavirus Disease 19 (COVID-19) sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, masyarakat dan bernegara, terutama dalam bidang social dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi adalah berupa pengurangan aktivitas perekonomian terutama untuk kegiatan produksi dengan pengurangan jumlah tenaga kerja dan kegiatan perdagangan barang dan jasa untuk memutus penyebaran COVID-19 sehingga berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat, dan pengangguran yang semakin meningkat.

Perekonomian Kabupaten Kampar mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2017 yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97%, namun pertumbuhan ekonomi sedikit menurun pada tahun 2018 sebesar 1,90% dan optimis akan meningkat sebesar 3,88% di tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi tertinggi untuk sektor ekonomi di Kabupaten Kampar ada pada sektor industri jasa lainnya sebesar 7,75%, industri pengolahan sebesar 7,25%, dan pertanian sebesar 6,80% di tahun 2017. Berdasarkan perkiraan tahun 2021 terjadi perubahan terhadap peranan sektor-sektor dalam PDRB. Peranan sektor yang paling dominan tahun 2021 adalah pengadaan listrik dan gas sebesar 7,56%, jasa lainnya 6,89%, dan selanjutnya diikuti oleh industri pengolahan sebesar 5,26%, serta jasa kesehatan dan sosial lainnya sebesar 5,15%. Perkembangan ekonomi yang mengalami pertumbuhan terendah ada pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar -5,55%, bahkan diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan negatif

sampai dengan tahun 2021 seiring dengan semakin berkurangnya peranan Kabupaten Kampar mengelola sektor ini.

Tabel 2 6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2013-2021

(Persen)

No	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.13	4.88	0.36	4.92	6.76	5.85	5.62	3.91	3.95
2	Pertambangan dan Penggalian	4.53	0.44	0.30	(0.73)	(5.33)	(5.60)	(5.85)	(1.59)	(1.35)
3	Industri Pengolahan	11.90	4.26	1.54	4.23	7.16	3.65	9.53	5.22	5.26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.25	20.96	8.90	12.52	4.81	6.64	3.38	7.52	7.56
5	Air, Sampah dan Limbah	0.36	1.07	2.11	(0.69)	2.78	-	0.34	0.74	0.78
6	Konstruksi	7.58	6.99	5.13	4.07	3.51	3.46	5.21	4.47	4.51
7	Perdagangan Besar dan Eceran	8.32	5.45	0.68	3.84	5.74	6.21	5.23	4.40	4.44
8	Transportasi dan Pergudangan	2.88	2.90	8.23	5.50	5.63	4.61	4.94	4.31	4.35
9	Akomodasi dan Makan Minum	2.81	2.37	3.88	4.24	4.09	4.15	6.64	3.51	3.55
10	Informasi dan Komunikasi	4.52	3.42	2.40	2.03	1.98	2.09	5.76	2.76	2.80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	11.61	8.90	(3.53)	3.55	2.98	4.68	0.25	3.45	3.49
12	Real Estat	3.74	4.56	4.43	1.43	2.97	3.73	5.45	3.28	3.32
13	Jasa Perusahaan	7.35	10.27	3.11	3.01	4.09	5.06	6.42	4.87	4.92
14	Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	3.01	1.25	2.02	0.06	3.14	2.92	4.84	2.14	2.18
15	Jasa Pendidikan	2.12	3.22	2.11	2.86	5.46	5.88	7.69	3.64	3.68
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.83	7.65	9.34	1.14	3.00	2.37	11.10	5.11	5.15
17	Jasa Lainnya	10.92	10.44	2.89	4.67	7.75	9.37	9.29	6.85	6.89
	PDRB	6.31	3.43	1.09	2.80	2.97	1.92	3.88	3.11	3.22

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2020 (Tahun 2020* - 2021* Angka Estimasi)

Kondisi makro perekonomian Kabupaten Kampar tahun 2019 sebelum terjadinya Pandemi COVID-19 diperkirakan nilainya akan tumbuh sebesar 3,88%, namun pada tahun 2020 yang sedang berjalan diperkirakan akan berada di bawahnya, yakni sekitar 3,11% dan melalui kerja keras dalam upaya pemulihan perekonomian di Kabupaten Kampar yang akan dilakukan pada tahun 2021 diperkirakan perekonomian pada tahun tersebut akan tumbuh sebesar 3,22%. Oleh karena perekonomian Kabupaten Kampar secara struktur didominasi oleh Pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal dan pasar ekspor, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar masih akan berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang hanya mencapai 2,84% (tahun 2019). Pertumbuhan ini selain didukung oleh semua sektor ekonomi walaupun kondisinya belum maksimal, juga didukung pula oleh kondisi ekonomi makro yang diharapkan akan cukup kondusif dengan laju inflasi yang masih terkendali.

Untuk mengetahui sektor mana yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peranan sektoral setiap tahunnya. Sektor pertanian masih memiliki pasar

domestik yang cukup kuat, peranannya masih cukup mampu untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar pada level 5,62% - 3,95% di tahun 2019-2021, hal ini antara lain disebabkan oleh berkembangnya subsektor perkebunan. Selain itu pertumbuhan sektor jasa lainnya juga memegang peranan yang cukup tinggi di tahun 2019-2021 yaitu sebesar 9,29% - 6,89%, diikuti oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 9,53% - 5,26%.

Berkaitan dengan sektor pertanian, dengan prediksi yang relatif menurun terutama untuk pembangunan pertanian tanaman pangan sangat berpengaruh terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah Kabupaten Kampar yang diselaraskan dengan program pembangunan nasional yaitu peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dengan intensifikasi. Ada kemungkinan program yang akan dilaksanakan tersebut mengalami kendala, karena situasi dan kondisi yang cukup memprihatinkan terkait dengan penggunaan lahan pertanian yang mendorong semakin menurunnya kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB Kabupaten Kampar. Kondisi ini diakibatkan oleh semakin meningkatnya kegiatan alih fungsi lahan untuk usaha perkebunan yang semakin luas terutama perkebunan kelapa sawit. Sampai dengan tahun 2018 lahan perkebunan kelapa sawit yang telah ada mencapai 225.916 hektar. Sedangkan untuk tanaman pangan hanya seluas 8.701 hektar, palawija 3.800 hektar, dan tanaman sayur-sayuran seluas 3.444 hektar. Adapun untuk pembangunan sub sektor peternakan dan perikanan kontribusinya juga masih cukup rendah dibandingkan dengan sub sektor perkebunan.

Membandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di setiap kabupaten/kota, kontribusi sektor pertambangan terutama migas masih cukup dominan mempengaruhi pertumbuhan PDRB. Pada umumnya setiap daerah mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis yang hampir 70 persen perekonomiannya bergantung pada migas, pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 masih mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2,54%, -1,71%, -1,62%, 2,08%, dan diperkirakan baru akan mengalami peningkatan pada level positif sebesar 1,05 dan 1,24 pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini diakibatkan oleh semakin kecilnya kontribusi sektor migas yang akan terus menurun dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya, termasuk Kabupaten Kampar pertumbuhan

perekonomiannya diperkirakan akan terus meningkat. Pertumbuhan di tahun 2019 perekonomian Kabupaten Kampar akan meningkat sebesar 3,88 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau. Sedangkan estimasi pertumbuhan ekonomi berdasarkan RPJMD Provinsi Riau, pada tahun 2020-2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar berkisar antara 2,90% - 2,96%.

Tabel 2.7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2016-2021 (Persen)

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*
1	Kuantan Singingi	3,89	4,37	4,68	2,62	4,76	5,04
2	Indragiri Hulu	3,69	3,98	3,49	3,78	4,17	4,33
3	Indragiri Hilir	4,68	4,52	3,61	4,19	4,84	4,89
4	Pelalawan	2,96	4,06	3,77	3,91	4,50	4,63
5	Siak	0,35	0,92	1,12	1,52	2,17	2,27
6	Kampar	2,80	2,97	1,92	3,88	2,90	2,96
7	Rokan Hulu	4,77	5,38	4,19	4,93	5,92	6,04
8	Bengkalis	(2,54)	(1,72)	(1,67)	(1,86)	1,05	1,24
9	Rokan Hilir	1,97	1,56	(0,25)	0,68	3,05	3,14
10	Kepulauan Meranti	3,20	3,29	4,04	2,66	4,01	4,07
11	Pekanbaru	5,68	6,12	5,40	6,01	6,51	6,65
12	Dumai	4,14	4,46	5,35	5,61	5,11	5,17
	Provinsi Riau	2,18	2,66	2,37	2,84	2,81	2,93

Sumber : Provinsi Riau Dalam Angka 2020 (Tahun 2016-2019) , dan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 (Tahun 2020-2021)

Dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang diinginkan dan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan serta dengan melihat tantangan yang dihadapi, maka kebijakan umum ekonomi daerah ke depan diarahkan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta memperkuat landasan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Selanjutnya gambaran tentang target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2 8 Target Indikator Makro Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional	Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Indeks Pembangunan Manusia
1	Kuantan Singingi	5,04	8,33	4,97	70,50
2	Indragiri Hulu	4,33	5,98	3,92	71,18
3	Indragiri Hilir	4,89	6,29	3,77	67,33
4	Pelalawan	4,63	8,42	3,36	71,91
5	Siak	2,27	4,45	4,01	74,42
6	Kampar	2,96	7,52	4,99	73,00
7	Rokan Hulu	6,04	9,38	5,13	71,53
8	Bengkalis	1,24	5,81	8,18	74,12
9	Rokan Hilir	3,14	6,85	4,36	69,01
10	Kepulauan Meranti	4,07	22,53	4,26	66,60
11	Pekanbaru	6,65	2,71	8,21	81,83
12	Dumai	5,17	3,27	5,30	74,53
	Provinsi Riau	2,93	6,62	5,96	73,13
	Indonesia	5,7	6,5	4,6	75,54

Sumber : RPJMD Provinsi Riau 2019-2024

Berdasarkan perkiraan kondisi ekonomi di tahun 2021 dalam konteks makro regional, dan dengan melihat kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional maupun Provinsi Riau, diestimasikan akan mampu tumbuh secara dinamis untuk mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menghadapi kondisi seperti ini memerlukan sikap hati-hati terutama dalam mengatasi eksisnya pada sektor riil dan imbasnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marjinal). Pengaruh pertumbuhan ini tentunya juga terkait dengan optimisme terhadap kontribusi kesempatan kerja yang tersedia tahun 2021 berdasarkan lapangan usaha, karena sebagian besar kesempatan kerja yang ada masih berada pada sektor pertanian sebesar 49,01%. Sedangkan kontribusi kesempatan kerja lainnya yang cukup tinggi adalah sektor perdagangan sebesar 20,16% dan jasa sebesar 13,45%.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat akan menimbulkan

persoalan pengangguran yang harus segera diselesaikan. Jumlah kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan angkatan kerja diperkirakan masih cukup besar di tahun 2021, sehingga akan menimbulkan pengangguran terbuka sebanyak 15.099 orang atau 4,17% terhadap kesempatan kerja yang tersedia berdasarkan lapangan usaha. Secara umum estimasi terhadap kondisi jumlah penduduk, kesempatan kerja, angkatan kerja, dan tingkat pengangguran disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2 9 Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kampar Tahun 2013-2021 (Orang)

No	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*	2020*	2021*
1	Pertanian	117.177	134.666	138.772	153.973	157.756	161.633	165.604	169.673	173.842
2	Pertambangan	10.285	13.115	3.966	2.589	2.040	1.607	1.267	998	786
3	Industri	9.533	19.004	13.158	14.811	15.764	16.778	17.857	19.006	20.228
4	Listrik, Air Minum	3.706	2.824	2.445	1.527	1.252	1.027	842	690	566
5	Bangunan	19.872	14.074	17.970	15.942	16.535	17.150	17.787	18.449	19.135
6	Perdagangan	70.802	60.259	58.831	67.858	68.853	69.863	70.887	71.927	72.982
7	Pengangkutan	12.057	9.546	10.163	14.538	14.667	14.796	14.927	15.059	15.192
8	Keuangan dan Bank	8.228	7.906	5.454	9.631	9.829	10.030	10.236	10.446	10.660
9	Jasa-Jasa	49.581	47.123	46.324	47.291	47.566	47.843	48.121	48.401	48.682
	Kesempatan Kerja	301.241	308.517	297.083	328.160	334.261	340.726	347.528	354.649	362.074
	Angkatan Kerja	321.141	328.545	320.491	348.846	354.136	359.912	365.576	371.330	377.174
	Pengangguran Terbuka	19.900	20.028	23.408	20.686	20.075	19.186	18.048	16.681	15.099
	Jumlah Penduduk	753.376	773.171	793.005	812.702	832.387	851.837	854.441	868.723	882.785

Sumber : Sakernas 2011-2014 dan Kampar Dalam Angka 2016-2019

Berdasarkan pertimbangan terhadap kondisi kesempatan kerja yang tersedia dan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, estimasi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,96% tahun 2021 diharapkan akan dapat menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Namun kondisi ini belum sesuai dengan harapan, karena nilai angka Indeks Gini Ratio tahun 2021 diperkirakan sebesar 0,27. Kondisi ini masih menunjukkan angka ketimpangan rendah, walaupun masih akan memberikan implikasi terhadap jumlah penduduk yang berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dengan penduduk berpendapatan rendah. Capaian angka ini merupakan prediksi yang didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Kampar yang relatif stabil dibandingkan pada tahun sebelumnya meskipun terdapat beberapa peristiwa dan kebijakan

ekonomi yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat secara umum.

Ketidakpastian gejolak harga BBM dan barang-barang kebutuhan masyarakat saat ini, dinilai akan berdampak pada kondisi perekonomian secara nasional maupun regional. Dengan kondisi seperti ini diperkirakan akan berimbas pada pendapatan penduduk Kampar yang semakin tidak merata. Perkiraan di tahun 2020-2021, untuk penduduk yang berpendapatan rendah hanya akan menerima persentase pendapatan sebesar 9,86% - 9,50%, penduduk berpendapatan sedang menerima 35,09% - 36,94% pendapatan, dan untuk penduduk yang berpenghasilan tinggi menerima porsi yang lebih besar yaitu 55,04% - 53,56%.

Tabel 2 10 Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat Tahun 2017-2021

Kelompok Masyarakat	Persentase Pendapatan Yang Diterima				
	2017	2018	2019	2020	2021
40% Penduduk Berpenghasilan Rendah	12,87	11,78	10,68	9,86	9,50
40% Penduduk Berpenghasilan Sedang	31,46	32,77	33,82	35,09	36,94
20% Penduduk Berpenghasilan Tinggi	55,67	55,45	55,50	55,04	53,56
Index Gini Ratio	0,346	0,315	0,301	0,295	0,303

Sumber : Diolah Dari Data Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau 2013-2017

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Gini Kabupaten Kampar termasuk kategori rendah karena berada pada kriteria $0 < G \leq 0,35$. Kondisi ini harus mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kampar karena berhubungan dengan masalah pendapatan dan kemiskinan. Dari tahun ke tahun pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi masalah ini dengan berbagai bentuk program penanggulangan kemiskinan.

Untuk dapat melihat keberhasilan pembangunan saat ini, kita dapat membandingkan tingkat kemiskinan yang terjadi di Provinsi Riau dari tahun 2017-2019. Berdasarkan data yang disajikan, pemerintah telah berusaha menurunkan persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin sebesar 8,02% pada tahun 2017 dan 7,71% pada tahun 2019. Sementara target yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 7,52%. Berdasarkan Tabel 3.10, dapat diketahui persentase jumlah penduduk

miskin yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 26,93%. Sedangkan angka kemiskinan terendah terdapat di Kota Pekanbaru sebesar 2,52%.

Tabel 2 11 Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2019

No	Kab/Kota/Provinsi	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk (000)			% Penduduk Miskin		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Kuantan Singingi	494.747	521.591	-	31,95	32,10	31,22	9,97	9,92	9,56
2	Indragiri Hulu	432.589	457.871	-	29,42	27,22	26,66	6,94	6,30	6,06
3	Indragiri Hilir	368.134	435.202	-	55,40	51,42	48,29	7,70	7,05	6,54
4	Pelalawan	487.648	515.581	-	44,40	44,29	45,98	10,25	9,73	9,62
5	Siak	414.501	431.814	-	26,83	25,81	24,49	5,80	5,44	5,03
6	Kampar	398.138	419.306	-	66,33	69,32	66,81	8,02	8,18	7,71
7	Rokan Hulu	446.901	467.343	-	69,24	72,28	72,21	10,91	10,95	10,53
8	Bengkalis	496.657	508.633	-	38,19	35,11	35,83	6,85	6,22	6,27
9	Rokan Hilir	367.338	371.067	-	53,19	48,92	49,80	7,88	7,02	7,01
10	Kep. Meranti	445.025	462.535	-	53,05	51,17	49,89	28,99	27,79	26,93
11	Pekanbaru	473.788	499.852	-	33,09	31,62	28,60	3,05	2,85	2,52
12	Dumai	403.244	418.597	-	13,53	11,19	10,95	4,57	3,71	3,56
	Riau	426.001	456.493	546.515	514,62	500,44	490,72	7,78	7,39	7,08
	Indonesia				27.771,22	25.949,80	25.144,72	10,64	10,64	

Sumber : Provinsi Riau Dalam Angka 2020

Agar proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar pada tahun 2020 dan 2021 tidak jauh berbeda dengan tahun 2019 dan diharapkan akan meningkat, perlu didukung dengan nilai investasi yang cukup tinggi serta nilai ekspor dan impor yang lebih proporsional. Pada tahun 2020 - 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diproyeksikan akan sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 3,11% - 3,22%. Sementara itu, nilai inflasi diharapkan hanya akan berkisar pada level 1,89% - 2,02%. Perkembangan investasi Kabupaten Kampar berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2013-2021 dapat dilihat pada tabel 3.11.

Tabel 2.12 Perkiraan Investasi Kabupaten Kampar Tahun 2013-2021 (Miliar Rupiah)

No	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,768.80	6,739.93	4,269.93	6,633.19	5,235.71	2,606.72	6,896.40	5,400.90	5,909.85
2	Pertambangan dan Penggalian	15,725.22	9,938.98	4,268.83	3,634.89	1,095.20	10,421.30	4,565.54	691.21	803.43
3	Industri Pengolahan	4,881.81	3,757.65	3,943.28	3,766.70	4,131.91	1,164.73	6,602.61	4,247.91	4,636.86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.79	21.71	38.18	27.75	28.57	13.46	20.58	22.27	25.13
5	Air, Sampah dan Limbah	0.05	0.28	1.00	0.20	0.64	0.10	0.55	0.36	0.39
6	Konstruksi	1,868.47	1,852.66	1,838.83	1,909.93	1,100.50	1,302.29	2,440.40	2,123.55	2,364.92
7	Perdagangan Besar dan Eceran	333.62	928.97	314.11	460.85	335.28	368.86	802.01	607.84	678.05
8	Transportasi dan Pergudangan	32.40	44.07	87.14	57.68	45.91	57.57	99.68	72.31	80.40
9	Akomodasi, Makanan dan Minum	9.79	11.43	15.68	20.89	9.64	10.07	21.68	15.82	17.40
10	Informasi dan Komunikasi	50.38	52.66	64.56	23.47	61.17	47.14	106.72	60.69	66.20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	137.17	145.14	9.94	86.05	58.15	90.10	55.26	90.11	98.94
12	Real Estat	143.39	271.98	228.51	208.84	115.68	131.77	302.27	220.13	241.55
13	Jasa Perusahaan	0.62	0.97	0.54	0.63	0.41	0.47	1.19	0.82	0.92
14	Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	179.71	86.05	133.07	201.50	256.11	219.26	392.61	205.48	222.96
15	Jasa Pendidikan	40.33	80.71	131.48	102.01	84.98	95.44	171.94	116.98	129.43
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	30.59	54.80	108.66	32.81	19.00	21.40	105.74	65.37	73.53
17	Jasa Lainnya	58.49	88.48	61.82	57.56	64.02	80.25	120.97	98.00	110.54
Jumlah		26,263.61	24,076.48	15,515.56	17,224.96	12,642.87	16,630.94	22,706.15	14,039.76	15,460.51

INVESTASI KAMPAR	2,449.72	2,756.36	2,825.05	2,550.02	2,421.15	2,322.55	2,588.35	2,702.28	2,850.08
INVESTASI MASYARAKAT PERTUMBUHAN HARGA BERLAKU	23,813.89	21,320.12	12,690.51	14,674.94	10,221.72	14,308.39	20,117.80	11,337.48	12,610.43
	14.80%	11.87%	-3.68%	5.12%	2.74%	7.84%	2.98%	5.00%	5.24%
PERTUMBUHAN HARGA KONSTAN	6.31%	3.43%	1.09%	2.80%	2.97%	1.92%	3.88%	3.11%	3.22%
% INVESTASI TERHADAP PDRB	42.69%	34.99%	23.41%	24.72%	17.62%	21.55%	28.56%	16.82%	17.60%
ICOR	2.88	2.95	(6.36)	4.83	6.42	2.75	9.59	3.36	3.36
INFLASI (%)	8.49%	8.44%	-4.77%	2.32%	-0.23%	5.92%	-0.90%	1.89%	2.02%

Sumber : Diolah Dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2019 (Tahun 2020-2021 Angka Estimasi)

Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, perkiraan investasi yang diinginkan sampai dengan tahun 2021 mempunyai tujuan untuk memenuhi sasaran ekonomi makro, direncanakan mempertahankan keseimbangan struktur perekonomian daerah dan mendukung prioritas pembangunan pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa, yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Perkiraan jumlah investasi sampai dengan tahun 2020 hanya akan mencapai Rp 14,039.76 miliar dan di tahun 2021 meningkat sebesar Rp 15,460.51 miliar. Sangat diharapkan besarnya angka investasi tahun 2020 akan mencapai 80,75% dan tahun 2021 semakin meningkat sebesar 81,57%, yang berasal dari pihak swasta dan masyarakat. Oleh karena itu yang lebih diutamakan adalah bagaimana meningkatkan produksi dan diversifikasi produk yang dapat dipasarkan ke dalam maupun ke luar negeri. Besarnya jumlah produksi, diharapkan dapat meningkatkan keuntungan yang pada akhirnya akan dapat mendorong peningkatan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Sebaliknya investasi pemerintah yang lebih kecil dari swasta sebesar 18,43% dan 17,25%, bertujuan ganda yaitu disamping menjaga stabilitasi, juga mewujudkan pemerataan pembangunan dengan titik berat investasi untuk kepentingan publik agar masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata.

2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Dengan dasar asumsi perkembangan perekonomian tahun 2017 – 2021 berjalan sesuai dengan kondisi riil daerah, maka pada tahun 2021 tantangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah diperkirakan sebagai berikut:

1. Peranan perekonomian secara makro masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 3,91% - 3,95%, terutama pada subsektor perkebunan, mendorong kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 5,22% - 5,26%, perdagangan 4,40% - 4,44% dan jasa 23,93% - 24,14%. Meningkatnya peranan sektor-sektor ini diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian daerah terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan distribusi pemerataan pendapatan masyarakat secara luas;

2. Dalam upaya untuk meningkatkan distribusi barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh daerah, kondisi yang harus dihadapi dalam era globalisasi ekonomi adalah makin ketatnya persaingan global, yang ditandai dengan membanjirnya produk impor sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan produksi dalam negeri dan melemahkan pasar lokal;
3. Isu ketersediaan dan kerawanan pangan akibat perubahan iklim yang sulit diprediksi, polemik gejolak harga kebutuhan pokok, munculnya hama dan penyakit tanaman, peternakan dan perikanan, alih fungsi lahan tanaman pangan, kerusakan lahan akibat bencana dan penggunaan bahan berbahaya (pupuk dan pestisida), serta pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sebesar 2,34%. Selain itu juga isu mutu dan keamanan pangan dan semakin terbukanya arus pasar global akan mempengaruhi daya saing produk-produk pertanian Kabupaten Kampar;
4. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi sebesar 7,71%, merupakan permasalahan tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kemiskinan yang diakibatkan oleh keterbatasan mengakses sumber daya produksi yang tersedia, maupun keterbatasan infrastruktur, diperlukan intervensi pemerintah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin. Selain itu membuka wilayah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur yang memadai bagi perkembangan investasi, pariwisata, dan kelancaran arus barang dan orang;
5. Banyak penduduk usia kerja yang masih mencari pekerjaan mengindikasikan bahwa perekonomian daerah belum optimal mampu menyerap tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahun. Selain itu produk sumberdaya manusia yang dihasilkan dunia pendidikan belum mampu mengimbangi kebutuhan dunia kerja. Rendahnya status pekerjaan sebagai usaha mandiri (wirausaha), memerlukan dorongan dan motivasi agar usaha mandiri dapat lebih berkembang dan menjadi alternatif bagi para tenaga kerja. Hal ini akan tercapai melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja serta penyediaan modal usaha yang murah dan sederhana persyaratannya;
6. Faktor eksternal yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah kebijakan nasional untuk mengurangi subsidi BBM dan menaikkan tarif dasar listrik, sehingga akan menyebabkan

meningkatnya biaya produksi dan transportasi. Usaha yang terkena dampak paling berat adalah usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat terutama masyarakat golongan kecil dan menengah;

7. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal terutama untuk sektor pertambangan dan pariwisata, serta semakin berkurangnya fungsi lingkungan hidup, lahan terbuka hijau dan menurunnya fungsi hutan, sehingga akan membawa dampak pada perkembangan perekonomian daerah;
8. Ketenteraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM masih perlu menjadi perhatian karena kondisi ekonomi, politik, sosial budaya masih rentan mengalami perubahan bahkan sangat cepat karena pengaruh globalisasi informasi dan reformasi demokrasi. Selain itu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah masih dirasakan belum memuaskan karena terbatasnya sumber pembiayaan, yang selanjutnya akan berdampak pada berkurangnya minat investor untuk berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Kampar.

Memperhatikan kondisi makro yang lalu dan perkembangan saat ini, kondisi perekonomian pada tahun 2020 dan 2021 diperkirakan akan sedikit menurun dibandingkan tahun 2019. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kampar memiliki beberapa prospek ekonomi yang masih dapat diandalkan, antara lain :

1. Karakteristik perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan, sebagian besar merupakan komoditi perkebunan karet, kelapa sawit, dan budidaya ikan air tawar;
2. Pergeseran peran sektor dari primer ke sekunder dan tersier menunjukkan trend positif bahkan relatif cepat sehingga akan memacu perolehan nilai tambah produksi yang cukup signifikan bagi masyarakat lokal atau semakin terpacunya pertumbuhan PDRB;
3. Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan air bersih, termasuk infrastruktur perdesaan telah ikut mendorong kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar, dan mengefisienkan sebaran distribusi barang-barang konsumsi masyarakat sehingga diharapkan dapat menahan laju inflasi;
4. Sektor UMKM dan koperasi sebagai pilar penting dalam perekonomian yang tahan krisis, sudah cukup berperan penting

dalam berbagai bidang usaha, yang menjadi alternatif lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat;

5. Untuk tumbuh sekitar 3,11% - 3,22% di tahun 2020 dan 2021, memang masih dibutuhkan investasi baru dari perkembangan investasi yang sudah ada. Dalam hal ini perlu selalu optimis akan hadirnya investor untuk menangani sektor-sektor yang memerlukan teknologi tinggi dan modal yang besar. Namun terhadap kegiatan ekonomi yang hanya memerlukan teknologi sederhana/tepat guna dan tidak memerlukan permodalan yang besar diharapkan dapat ditangani oleh UMKM dan usaha perseorangan yang ada di wilayah Kampar cukup banyak terutama usaha produktif yang berada di tingkat kecamatan dan perdesaan;
6. Beberapa pengungkit pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan terutama pada wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta wilayah-wilayah yang perbatasan langsung dengan kota/kabupaten dan provinsi tetangga. Dengan semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur, menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik sehingga akan menambah spirit perkembangan perekonomian dan investasi;
7. Terganggunya stabilitas perekonomian secara internasional dan nasional yang disebabkan karena terjadinya pandemi COVID-19, sehingga berdampak terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Kampar berupa penurunan dan perlambatan laju pertumbuhan oleh karena terdapat beberapa sektor strategis yang berskala nasional dan internasional di Kabupaten Kampar.
8. Masih sangat memungkinkan untuk mengembangkan pasar lokal, meningkatkan daya saing daerah melalui produk unggulan utama sehingga dalam beberapa tahun kedepan Kampar memiliki produk-produk unggulan yang mampu bersaing di pasar regional, nasional maupun internasional dan sekaligus mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional Provinsi Riau, Nasional, dan Internasional.

Disamping itu asumsi-asumsi yang menjadi pertimbangan dalam memprakirakan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2021 adalah :

1. Apabila perekonomian nasional akan fokus pada upaya pemulihan sebagai akibat dari terjadinya pandemi COVID-19, sehingga pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya sekitar 5,6% akan

- mengalami koreksi dan pada gilirannya akan terjadi restrukturisasi dan perubahan alokasi APBN sehingga dana perimbangan diprediksikan akan mengalami penurunan;
2. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional terganggu akibat pandemi COVID-19, maka ekonomi regional akan ikut terganggu dan apabila pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021 diprediksikan 5,6% dan Provinsi Riau 2,93%, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diharapkan akan tumbuh sebesar 3,22% dan pada saat yang sama diprediksikan PAD akan meningkat sebesar 15,32%;
 3. Porsi belanja langsung APBD (dana pembangunan daerah) dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan dengan belanja tidak langsung terutama belanja pegawai dan sharing pembiayaan kemitraan dengan pemerintah pusat dan provinsi;
 4. Pelaksanaan APBN dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah dan stimulan perekonomian daerah, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan;
 5. Perekonomian Nasional maupun daerah tidak terganggu oleh situasi politik dan keamanan yang kurang kondusif;
 6. Tidak terjadi bencana alam yang merusak infrastruktur dan sumber perekonomian masyarakat, walaupun terjadi namun masih dalam batas-batas normal yang dapat dikendalikan dampaknya;
 7. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan akan meningkat pada kisaran 3,22% yang diharapkan semakin merata, dan juga sudah mulai tumbuhnya investasi karena situasi yang semakin kondusif, walaupun diperkirakan inflasi sekitar 2,02%;
 8. Tingkat kemiskinan diprediksi akan berkurang pada tahun 2021 sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh;
 9. Dengan kondisi di atas diharapkan pada tahun 2021 semakin meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan baru pada sektor formal sehingga tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama diharapkan akan semakin menurun.

2.2 Arah kebijakan keuangan daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Kebijakan keuangan daerah secara langsung akan mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah secara keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Dengan demikian keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Kebijakan keuangan daerah secara langsung akan mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah secara keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Kebijakan keuangan daerah antara lain meliputi: 1) Kebijakan Pendapatan Daerah, 2) Kebijakan Belanja Daerah, dan 3) Kebijakan Pembiayaan Daerah. Secara umum kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana kepada pemerintah.

Untuk kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Untuk kebijakan belanja daerah, kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam

program dan kegiatan. Dengan demikian belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.

Untuk pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SILPA.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Kebijakan umum APBD dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dasar yang sangat berpengaruh terhadap

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Asumsi yang dijadikan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun (RAPBN) tahun 2021 adalah sebagai berikut.

1. Untuk asumsi dasar ekonomi makro disepakati pertumbuhan ekonomi 4,5% – 5,5%, inflasi 2% – 4%, nilai tukar Rupiah terhadap USD Rp13.700 – Rp14.900, suku bunga SBN 10 Tahun 6,29% – 8,29%.
2. Untuk target pembangunan, disepakati tingkat pengangguran terbuka 7,7% – 9,1%, tingkat kemiskinan 9,2% – 9,7%, indeks Gini Rasio 0,377 – 0,379, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,78 – 72,95.
3. Indikator pembangunan yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) di kisaran 102 – 104 serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) di kisaran 102 – 104.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD terdiri dari pertumbuhan ekonomi, Perkembangan nilai PDRB dan Inflasi.

Kondisi makro ekonomi digambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara umum dibagi ke dalam nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. Kondisi PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku sampai dengan tahun 2021 diperkirakan masih akan lebih dominan pada sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi dan perdagangan. Secara nominal, keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018-2019, sedangkan di tahun 2020-2021 mengalami penurunan. Nilai PDRB secara keseluruhan pada tahun 2020 sebesar Rp 72.977,19 miliar sedangkan di tahun 2021 diperkirakan akan meningkat menjadi sebesar Rp 73.325,27 miliar. Gambaran lengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3 1 Perkiraan Investasi Kabupaten Kampar Tahun 2013-2021 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	BPS			Estimasi
	2018	2019	2020	2021
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20.289,02	21.509,61	24.188,13	26.359,26
B, Pertambangan dan Penggalian	28.297,52	25.026,73	17.915,55	15.782,81
C, Industri Pengolahan	17.000,87	18.155,79	18.788,31	19.195,38
D, Pengadaan Listrik dan Gas	44,16	47,82	52,81	58,52
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,91	4,01	4,05	4,10
F, Konstruksi	5.439,62	5.907,26	5.734,65	5.600,87
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	2.605,67	2.882,33	2.564,46	2.490,63
H, Transportasi dan Pergudangan	237,61	262,55	255,69	270,14
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	65,70	70,93	60,56	58,14
J, Informasi dan Komunikasi	287,47	311,15	336,51	359,70
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	322,67	328,95	340,29	349,56
L, Real Estat	708,73	761,29	779,20	794,23
M,N, Jasa Perusahaan	2,67	2,97	2,43	2,31
O, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	1.089,34	1.160,87	1.112,76	1.104,60
P, Jasa Pendidikan	385,86	425,17	447,55	484,55
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	135,77	157,02	182,09	204,62
R,S,T,U, Jasa lainnya	236,32	264,37	212,15	205,87
PDRB	77.152,93	77.278,81	72.977,19	73.325,27

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2021

Perekonomian Kabupaten Kampar bisa dilihat dari kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap PDRB. Kontribusi ini bisa mencerminkan bagaimana struktur ekonomi di wilayah Kabupaten Kampar. Tabel 3.2 menggambarkan struktur ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, dengan kontribusi dari masing-masing sektor. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan dalam menyumbang PDRB di Kabupaten Kampar, dengan sub sektor perkebunan sebagai kontributor terbesar terhadap sektor pertanian. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa struktur ekonomi dari Kabupaten Kampar merupakan pertanian dengan kekuatan pada sub sektor perkebunan. Hal menarik lain dari kontributor ekonomi terbesar adalah sumbangan sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Selanjutnya sektor terendah yang memberikan kontribusi terhadap PDRB adalah sektor listrik dan gas, air, sampah dan limbah, akomodasi, makan dan minum, serta jasa perusahaan. Perkembangan selanjutnya dari tahun 2018 sampai dengan estimasi tahun 2021 memperlihatkan persentase yang relatif stabil, dengan kata lain struktur ekonomi untuk

sektor ini sedikit sekali mengalami perubahan. Bahkan ketika Kabupaten Kampar dihadapkan pada persoalan Pandemi Covid 19 di tahun 2020-2021, sektor ini diperkirakan masih akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil estimasi, juga diperkirakan bahwa kontribusi sektor terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 akan mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Distribusi sektor yang mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya adalah sektor pertambangan sebesar 36,68% - 21,52%. Selanjutnya adalah pertanian masih akan tetap mendominasi sebesar 26,30% - 35,95%, dengan komoditas terbesar berasal dari tanaman perkebunan kelapa sawit dan karet. Sedangkan untuk sektor berikutnya adalah industri pengolahan sebesar 22,04% - 26,18%, konstruksi 7,05% - 7,64%, dan perdagangan 3,38% - 3,40%. Adapun estimasi untuk sektor lainnya seperti pengadaan listrik dan gas, air, sampah dan limbah, akomodasi makanan dan minuman, serta jasa perusahaan hanya sedikit mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021.

Tabel 3 2 . Struktur Ekonomi Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2021 (Persen)

Lapangan Usaha PDRB	BPS			Estimas
	2018	2019	2020	2021
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,30	27,83	33,14	35,95
B, Pertambangan dan Penggalian	36,68	32,38	24,55	21,52
C, Industri Pengolahan	22,04	23,49	25,75	26,18
D, Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07	0,08
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01
F, Konstruksi	7,05	7,64	7,86	7,64
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,38	3,73	3,51	3,40
H, Transportasi dan Pergudangan	0,31	0,34	0,35	0,37
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,09	0,09	0,08	0,08
J, Informasi dan Komunikasi	0,37	0,40	0,46	0,49
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	0,42	0,43	0,47	0,48
L, Real Estat	0,92	0,99	1,07	1,08
M,N, Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00
O, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,41	1,50	1,52	1,51
P, Jasa Pendidikan	0,50	0,55	0,61	0,66
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,18	0,20	0,25	0,28
R,S,T,U, Jasa lainnya	0,31	0,34	0,29	0,28
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2021

Perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Kampar berikutnya adalah estimasi berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, sebagai alternatif lain dalam melihat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan PDRB riil. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Kabupaten Kampar juga masih sangat didominasi oleh sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi ini ditunjukkan oleh peranan sektor pertanian yang diperkirakan pada tahun 2021 masih cukup dominan mempengaruhi pertumbuhan pembangunan seluruh sektor lapangan usaha selain pertumbuhan sektor minyak dan gas, terutama yang didukung oleh perkembangan sub sektor perkebunan.

Berdasarkan tabel 3.3, perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 diperkirakan akan terus menunjukkan peningkatan. Jika di tahun 2018 nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar Rp 49.958,84 miliar, maka perkiraan angkanya di tahun 2021 akan meningkat sebesar Rp 51.591,47 miliar. Kontribusi sektor yang paling dominan adalah pertanian dengan nilainya sebesar Rp 15.433,67 miliar (30,89%) di tahun 2018, sedangkan estimasi perkembangannya di tahun 2021 nilainya akan meningkat sebesar Rp 18.019,73 miliar (34,93%). Selanjutnya distribusi perkembangan sektor yang paling dominan lainnya adalah industri pengolahan dengan nilai Rp 14.668,08 miliar (29,36%) di tahun 2018 dan diperkirakan akan meningkat sebesar Rp 15.817,64 miliar (30,68%) tahun 2021. Sumbangan sektor-sektor lainnya yang cukup dominan memberikan kontribusi penting adalah konstruksi sebesar Rp 3.348,10 miliar (6,70%) di tahun 2018 dan sebesar Rp 2.801,34 miliar (5,91%) di tahun 2021. Selanjutnya adalah sektor perdagangan sebesar Rp 1.631,83 miliar (3,27%) di tahun 2018 dan turun sebesar Rp 1.219,02 miliar (2,58%) di tahun 2021.

Tabel 3 3 PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2021 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha PDRB	BPS			
	2018	2019	2020	Estimasi 2021
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.433,67	16.318,59	17.167,01	18.019,73
B, Pertambangan dan	12.362,26	11.628,04	10.890,71	10.836,12

Penggalian				
C, Industri Pengolahan	14.668,08	16.051,38	15.900,92	15.829,93
D, Pengadaan Listrik dan Gas	26,01	26,89	29,19	30,79
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,96	2,97	2,99	2,87
F, Konstruksi	3.348,10	3.522,45	3.406,73	3.048,26
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1.631,83	1.717,26	1.466,38	1.333,24
H, Transportasi dan Pergudangan	162,60	170,63	156,80	161,27
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	42,64	45,47	38,04	33,66
J, Informasi dan Komunikasi	214,85	227,22	245,93	249,39
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	238,84	239,43	248,66	239,11
L, Real Estat	487,88	514,40	524,57	494,97
M,N, Jasa Perusahaan	1,87	1,99	1,59	1,43
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	830,10	870,31	810,96	781,80
P, Jasa Pendidikan	252,82	272,27	280,36	283,10
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87,62	97,35	110,36	115,22
R,S,T,U, Jasa lainnya	166,71	182,20	142,70	130,58
PDRB	49.958,84	51.888,86	51.423,90	51.591,47

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2021

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kampar mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,88%, namun perkiraan ini akan menurun drastis pada tahun 2020 sebesar -0,90%. Hal ini diakibatkan oleh adanya pengaruh pandemi Covid-19 diseluruh Indonesia dan secara khusus imbasnya juga sangat berpengaruh terhadap Kabupaten Kampar, sehingga akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan pada beberapa sektor terutama perdagangan, transportasi, akomodasi, jasa perusahaan dan jasa lainnya. Akibat dari rendahnya angka pertumbuhan yang berada pada level negatif, hal ini akan berakibat pula pada turunnya angka perkiraan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, angka pertumbuhan optimis diperkirakan baru akan berada pada level 0,33%. Selanjutnya berdasarkan perkiraan tahun 2021 akan terjadi perubahan terhadap peranan sektor-sektor dalam PDRB. Peranan sektor yang paling dominan tahun 2021 adalah pengadaan listrik dan gas sebesar 5,47%, pertanian sebesar 4,97%, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 4,41%.

Tabel 3 4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2018-2021

(Persen)

Lapangan Usaha PDRB	BPS			Estimasi
	2018	2019	2020	2021
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,73	5,73	5,20	4,97
B, Pertambangan dan Penggalian	-5,51	-5,94	-6,34	-0,50
C, Industri Pengolahan	3,65	9,43	-0,94	-0,45
D, Pengadaan Listrik dan Gas	6,64	3,38	8,55	5,47
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,34	0,67	-4,09
F, Konstruksi	3,46	5,21	-3,29	-10,52
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,19	5,24	14,61	-9,08
H, Transportasi dan Pergudangan	4,61	4,94	-8,11	2,85
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,15	6,64	16,34	-11,52
J, Informasi dan Komunikasi	2,09	5,76	8,23	1,41
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	4,68	0,25	3,85	-3,84
L, Real Estat	3,72	5,44	1,98	-5,64
M,N, Jasa Perusahaan	5,06	6,42	20,10	-10,12
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,92	4,84	-6,82	-3,60
P, Jasa Pendidikan	5,88	7,69	2,97	0,98
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,37	11,10	13,36	4,41
R,S,T,U, Jasa lainnya	9,37	9,29	21,68	-8,49
PDRB	1,91	3,86	-0,90	0,33

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2021

Kondisi makro perekonomian Kabupaten Kampar setelah fase pandemi dengan berbagai upaya pemulihan perekonomian, pada tahun 2021 diperkirakan hanya akan tumbuh pada level 0,33%. Oleh karena perekonomian Kabupaten Kampar secara struktur didominasi oleh pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal dan pasar ekspor, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diperkirakan masih akan berada di bawah perkiraan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang mencapai angka 0,41% (triwulan 1). Pertumbuhan ini selain didukung oleh semua sektor ekonomi walaupun kondisinya belum maksimal, juga didukung oleh kondisi ekonomi makro yang diharapkan akan cukup kondusif dengan laju inflasi yang masih terkendali.

Untuk mengetahui sektor mana yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peranan

sektoral setiap tahunnya. Sektor pertanian masih memiliki pasar domestik yang cukup kuat, peranannya masih cukup mampu untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar pada level 4,97% pada tahun 2021, hal ini antara lain disebabkan oleh berkembangnya subsektor perkebunan.

Berkaitan dengan sektor pertanian, dengan prediksi yang relatif menurun terutama untuk pembangunan pertanian tanaman pangan sangat berpengaruh terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah Kabupaten Kampar yang diselaraskan dengan program pembangunan nasional yaitu peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dengan intensifikasi. Ada kemungkinan program yang akan dilaksanakan tersebut mengalami kendala, karena situasi dan kondisi yang cukup memprihatinkan terkait dengan penggunaan lahan pertanian yang mendorong semakin menurunnya kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB Kabupaten Kampar. Kondisi ini diakibatkan oleh semakin meningkatnya kegiatan alih fungsi lahan untuk usaha perkebunan yang semakin luas terutama perkebunan kelapa sawit. Sampai dengan tahun 2020 lahan perkebunan kelapa sawit yang telah ada mencapai 226.003 hektar. Sedangkan untuk tanaman pangan hanya seluas 5.364 hektar, palawija 3.800 hektar, dan tanaman sayur-sayuran seluas 3.444 hektar. Adapun untuk pembangunan sub sektor peternakan dan perikanan kontribusinya juga masih cukup rendah dibandingkan sub sektor perkebunan.

Dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang diinginkan dan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan serta dengan melihat tantangan yang dihadapi, maka kebijakan umum ekonomi daerah ke depan diarahkan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta memperkuat landasan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Prioritas pembangunan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang terkait dengan kebijakan:

1. Nasional. Berdasarkan Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021, tema pembangunannya adalah "Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus: pemulihan industri, pariwisata dan Investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem jaring pengaman nasional; dan reformasi sistem

ketahanan nasional". Beberapa sasaran utama yang ingin dicapai adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi 5%, tingkat pengangguran 7,7%, tingkat kemiskinan 9,2%, dan Indeks Pembangunan Manusia 72,78;

2. Provinsi. Pembangunan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Riau tahun 2021 adalah "Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial melalui pemantapan pengembangan industri, pertanian pariwisata, yang mendorong perdagangan dan jasa dengan lima prioritas pembangunan daerah yaitu: pengembangan industri; pengembangan pertanian; pengembangan pariwisata; pengembangan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan pengembangan sumberdaya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing". Beberapa sasaran utama yang akan dicapai adalah pertumbuhan ekonomi 2,93%, tingkat pengangguran 5,96%, tingkat kemiskinan 6,5%, dan Indeks Pembangunan Manusia 73,13;
3. Kabupaten Kampar. Tema RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021 adalah "Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial untuk kehidupan normal yang baru, dengan fokus: pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi; memperkuat sistem kesehatan daerah; pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing; pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi; pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan". Prioritas ini diarahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan target yang akan dicapai sebesar 0,33%, pengangguran terbuka 5,82%, penduduk di bawah garis kemiskinan sebesar 7,52%, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,00.

Berdasarkan perkiraan kondisi ekonomi di tahun 2021 dalam konteks makro regional, dan dengan melihat kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional maupun Provinsi Riau, diestimasikan akan mampu tumbuh secara dinamis untuk mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menghadapi kondisi seperti ini memerlukan sikap hati-hati terutama dalam mengatasi eksisnya pada sektor riil dan imbasnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marjinal). Pengaruh pertumbuhan ini tentunya juga terkait dengan optimisme terhadap kontribusi kesempatan kerja yang tersedia tahun 2021.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat akan menimbulkan persoalan pengangguran yang harus segera diselesaikan. Jumlah kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan angkatan kerja diperkirakan masih cukup besar di tahun 2021, sehingga akan menimbulkan pengangguran terbuka sebanyak 23.540 orang atau 5,82% terhadap kesempatan kerja yang tersedia. Masalah pengangguran yang terjadi di Kabupaten Kampar bukan hanya disebabkan oleh kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia, tetapi juga pencari kerja yang ada kurang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan calon pengguna tenaga kerja, akibatnya kesempatan kerja tidak termanfaatkan. Secara umum estimasi terhadap kondisi angkatan kerja, Bukan Angkatan Kerja dan tingkat pengangguran disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3 5 Perkembangan Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 (Orang)

Kegiatan Utama	BPS				Estimasi
	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja	348.846	372.775	367.149	388.609	404.135
- Bekerja	328.160	352.470	345.195	364.698	380.594
- Pengangguran Terbuka	20.686	20.305	21.954	23.911	23.540
Bukan Angkatan Kerja	221.493	215.394	235.676	220.647	221.091
- Sekolah	72.545	64.084	61.277	60.454	60.182
- Mengurus Rumah Tangga	126.353	127.192	143.135	135.959	137.096
- Lainnya	22.595	24.118	31.264	24.234	23.814
Jumlah	570.339	588.169	602.825	609.256	625.226
Tingkat Pengangguran (%)	5,93	5,45	5,98	6,15	5,82

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2021

Berdasarkan pertimbangan terhadap kondisi kesempatan kerja yang tersedia dan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, estimasi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,33% tahun 2021 diharapkan akan dapat menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Namun kondisi ini belum sesuai dengan harapan, karena nilai angka Indeks Gini Ratio tahun 2021 diperkirakan sebesar 0,32. Kondisi ini masih menunjukkan angka ketimpangan rendah, walaupun masih akan memberikan implikasi terhadap jumlah penduduk yang berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk

berpendapatan tinggi dengan penduduk berpendapatan rendah. Capaian angka ini merupakan prediksi yang didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Kampar tahun 2021 yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2018-2019 meskipun terdapat beberapa peristiwa dan kebijakan ekonomi yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat secara umum.

Polemik harga BBM, harga komoditas kebutuhan masyarakat, dan pandemi Covic-19 akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional maupun regional. Hal ini akan terkait dengan upaya-upaya pemerintah daerah dalam menjaga stok kebutuhan bahan pangan melalui pemberdayaan kemampuan lokal. Akibat dari kondisi seperti ini akan berimbas pada distribusi pendapatan kelompok masyarakat yang semakin tidak merata. Perkiraan di tahun 2021, untuk penduduk yang berpendapatan rendah hanya akan menerima persentase pendapatan sebesar 10,42%, penduduk berpendapatan sedang menerima 13,05% pendapatan, dan untuk penduduk yang berpenghasilan tinggi menerima porsi yang lebih besar yaitu 76,53%.

Tabel 3 6 Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat Tahun 2017-2021

Kelompok Masyarakat	Persentase Pendapatan Yang Diterima				
	2017	2018	2019	2020	2021
40% Penduduk Berpenghasilan Rendah	12,87	14,90	13,54	12,02	10,42
40% Penduduk Berpenghasilan Sedang	31,46	25,32	20,77	16,67	13,05
20% Penduduk Berpenghasilan Tinggi	55,67	59,77	65,70	71,31	76,53
Index Gini Ratio	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32

Sumber : Diolah Dari Data Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau 2017-2018

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Gini Kabupaten Kampar termasuk kategori rendah karena berada pada kriteria $0 < G \leq 0,35$. Angka Indeks Gini Rasio tahun 2021 sebesar 0,32. Kondisi ini harus mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kampar karena berhubungan dengan masalah pendapatan dan kemiskinan. Dari tahun ke tahun pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi masalah ini dengan berbagai bentuk program penanggulangan kemiskinan.

Perkembangan ekonomi nasional tentu akan berimbang pada kinerja ekonomi Kabupaten Kampar tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi diharapkan membaik apabila terjadi keseimbangan antara pertumbuhan makro dan mikro ekonomi di berbagai sektor dan subsektor. Agar proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar pada tahun 2021 meningkat, maka perlu didukung dengan nilai investasi yang cukup tinggi serta nilai ekspor dan impor yang proporsional. Selain itu perlu peningkatan penguatan daya tahan ekonomi lokal melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk serta perluasan kesejahteraan rakyat, sehingga pertumbuhan ekonomi diharapkan akan terus meningkat. Laju inflasi akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan laju inflasi nasional dan regional Riau, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga. Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diproyeksikan meningkat pada kisaran 0,33%. Sementara itu, inflasi diperkirakan sebesar 0,15%. Gambaran lengkap tentang kondisi investasi Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 7 Estimasi Kebutuhan Investasi (PMTB) Kabupaten Kampar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2021 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha PDRB	2018	2019	2020	2021
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.578,29	12.194,85	30.724,99	24.713,67
B, Pertambangan dan Penggalian	16.106,20	-4.750,46	27.123,73	-10.733,94
C, Industri Pengolahan	2.776,23	11.050,72	16.220,57	9.932,23
D, Pengadaan Listrik dan Gas	16,04	39,17	78,24	68,99
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,26	1,33	2,04	1,37
F, Konstruksi	1.699,49	4.666,20	4.265,07	1.818,41
G, Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	825,24	2.415,49	494,76	586,20
H, Transportasi dan Pergudangan	88,60	207,54	160,76	205,78
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,86	48,96	11,41	4,15
J, Informasi dan Komunikasi	70,68	199,81	357,32	288,23
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	110,01	138,66	292,35	192,70
L, Real Estat	165,70	507,75	679,73	424,64
M,N, Jasa Perusahaan	0,77	2,49	0,94	0,05
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	278,57	662,72	416,18	293,88
P, Jasa Pendidikan	135,86	326,95	460,55	448,32
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	30,19	158,05	293,25	249,79
R,S,T,U, Jasa lainnya	109,70	235,24	93,86	42,75
Investasi (PMTB)	26.008,71	28.105,48	27.428,30	28.537,21

Sumber : Diolah Dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2020

Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, perkiraan investasi yang diinginkan sampai dengan tahun 2021 mempunyai tujuan untuk memenuhi sasaran ekonomi makro, direncanakan mempertahankan keseimbangan struktur perekonomian daerah dan mendukung prioritas sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa, yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Perkiraan investasi sampai dengan tahun 2021 akan mencapai Rp 28.537,21 miliar. Sangat diharapkan besarnya investasi yang berasal dari swasta/masyarakat pada tahun 2021 mencapai 91,57%, oleh karena itu yang lebih diutamakan adalah bagaimana meningkatkan produksi dan diversifikasi produk yang dapat dipasarkan ke dalam maupun ke luar negeri. Besarnya jumlah produksi, diharapkan dapat meningkatkan keuntungan yang pada akhirnya akan dapat mendorong peningkatan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Sebaliknya investasi pemerintah yang lebih kecil dari swasta sebesar 8,43%, bertujuan ganda yaitu disamping menjaga stabilitasi, juga mewujudkan pemerataan pembangunan dengan titik berat investasi untuk kepentingan publik agar masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata.

Dengan tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, jika tidak diiringi oleh distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata, akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin besar. Besarnya investasi masyarakat tersebut harus terkait dengan unsur pemerataan, sehingga kesenjangan hasil-hasil pembangunan dan pendapatan di dalam masyarakat dapat diatasi. Oleh karena itu kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Estimasi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin pelayanan dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Dengan mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2021 masih tetap mampu mengurangi ketimpangan serta membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif.

Dengan dasar asumsi perkembangan perekonomian tahun 2018 - 2021 berjalan sesuai dengan kondisi riil daerah, tahun 2021 tantangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah adalah:

1. Peranan perekonomian secara makro masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 4,97%, terutama pada subsektor perkebunan, akan mendorong kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar -0,45%, perdagangan 9,08%, dan jasa -26,3%. Meningkatnya peranan sektor-sektor ini diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian daerah terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan distribusi pemerataan pendapatan masyarakat secara luas;
2. Dalam upaya untuk meningkatkan distribusi barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh daerah, kondisi yang harus dihadapi dalam era globalisasi ekonomi adalah makin ketatnya persaingan global, yang ditandai dengan membanjirnya produk impor sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan produksi dalam negeri dan melemahkan pasar lokal;
3. Isu ketersediaan dan kerawanan pangan akibat perubahan iklim yang sulit diprediksi, polemik gejolak harga kebutuhan pokok, munculnya hama dan penyakit tanaman, peternakan dan perikanan, alih fungsi lahan tanaman pangan, kerusakan lahan akibat bencana dan penggunaan bahan berbahaya (pupuk dan pestisida), serta pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sebesar 1,85%. Selain itu juga isu mutu dan keamanan pangan dan semakin terbukanya arus pasar global akan mempengaruhi daya saing produk-produk pertanian Kabupaten Kampar;
4. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi sebesar 6,5%, merupakan permasalahan tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kemiskinan yang diakibatkan oleh keterbatasan mengakses sumber daya produksi yang tersedia, maupun keterbatasan infrastruktur, diperlukan intervensi pemerintah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin. Selain itu membuka wilayah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur yang memadai bagi perkembangan investasi, pariwisata, dan kelancaran arus barang dan orang;
5. Banyak penduduk usia kerja yang masih mencari pekerjaan mengindikasikan bahwa perekonomian daerah belum optimal mampu

- menyerap tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahun. Selain itu produk sumberdaya manusia yang dihasilkan dunia pendidikan belum mampu mengimbangi kebutuhan dunia kerja. Rendahnya status pekerjaan sebagai usaha mandiri (wirausaha), memerlukan dorongan dan motivasi agar usaha mandiri dapat lebih berkembang dan menjadi alternatif bagi para tenaga kerja. Hal ini akan tercapai melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja serta penyediaan modal usaha yang murah dan sederhana persyaratannya;
6. Faktor eksternal yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah kebijakan nasional untuk mengurangi subsidi BBM dan menaikkan tarif dasar listrik, sehingga akan menyebabkan meningkatnya biaya produksi dan transportasi. Usaha yang terkena dampak paling berat adalah usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat terutama masyarakat golongan kecil dan menengah;
 7. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal terutama untuk pengembangan sektor pertambangan dan pariwisata, serta semakin berkurangnya fungsi lingkungan hidup, lahan terbuka hijau dan menurunnya fungsi hutan, sehingga akan membawa dampak pada perkembangan perekonomian daerah;
 8. Ketenteraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM masih perlu menjadi perhatian karena kondisi ekonomi, politik, sosial budaya masih rentan mengalami perubahan bahkan sangat cepat karena pengaruh globalisasi informasi dan reformasi demokrasi. Selain itu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah masih dirasakan belum memuaskan karena terbatasnya sumber pembiayaan, yang selanjutnya akan berdampak pada berkurangnya minat investor untuk berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan isu terhadap lingkungan internal dan eksternal di atas yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, maka fokus rencana kebijakan perekonomian yang akan dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Kampar tahun 2021 adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya pertanian, industri, perdagangan dan jasa, dengan berbasis pada pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi, yang bergerak pada sektor potensial antara lain meningkatkan dan memperkuat UMKM dan Koperasi yang

- menyangkut aspek permodalan, keterampilan, diversifikasi aktivitas ekonomi dan akses terhadap pasar, mengembangkan usaha berbasis sumberdaya lokal, mengembangkan objek wisata, dan usaha jasa kepariwisataan, mengembangkan sektor jasa, industri dan perdagangan dengan mengutamakan pelaku usaha yang melibatkan masyarakat, mengembangkan dan meningkatkan produksi pertanian;
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing, mandiri, menguasai perkembangan IPTEK dan tetap memegang teguh IMTAQ;
 3. Peningkatan dan pengembangan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing;
 4. Peningkatan dan pengembangan struktur perekonomian melalui pengembangan potensi dan produk unggulan yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing melalui sinergi sektor hulu dan hilir;
 5. Peningkatan dan pengembangan produk dan produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berorientasi pada sistem agrobisnis guna mempertahankan swasembada dan ketahanan pangan;
 6. Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi, kelembagaan, dan sarana-prasarana pendukung pengolahan hasil pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata;
 7. Tersusunnya peraturan/regulasi yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat;
 8. Berkembangnya daerah penyangga bahan baku untuk UMKM, melalui pemanfaatan teknologi tepat guna.

Selanjutnya untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama lokal, regional dan antarwilayah dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah guna meningkatkan daya tarik investasi, fokus sasarannya adalah :

1. Terbentuknya jejaring kerjasama antar daerah dan antar lembaga yang semakin mantap dan sinergis dalam bidang-bidang yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan perekonomian daerah dan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Terpenuhinya sarana prasarana serta pelaksanaan kerjasama antarlembaga di daerah dan wilayah;
3. Meningkatkan ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan;

4. Meningkatkan kualitas manajemen pariwisata, yang mendukung pengembangan ekonomi lokal;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu, benih bermutu, pengendalian hama terpadu, optimalisasi pupuk organik dan penerapan teknologi tepat guna;
6. Meningkatkan kualitas forum pengembangan ekonomi daerah;
7. Berkembangnya potensi lokal melalui pendekatan klaster dan kawasan, khususnya pertanian, industri dan pariwisata;
8. Memperkuat kemandirian wilayah melalui pengembangan klaster dan Regional Economic Development Strategic Program dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan potensi lokal;
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik meliputi peningkatan sistem pelayanan, sarana dan prasarana serta regulasi melalui One Stop Services;
10. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumberdaya manusia, sarana prasarana dan aparatur;

Selanjutnya sehubungan dengan meningkatkan daya saing dan kemandirian wilayah dilakukan upaya peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat, secara operasional meliputi:

1. Meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi penanganan pengangguran, kemiskinan, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan;
2. Memperkuat pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing ekonomi daerah meliputi Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK), Pariwisata dan UMKM dengan dukungan infrastruktur yang mamadai;
3. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan layanan publik, antara lain; peningkatan pelayanan prima, pengembangan sarana dan prasarana pelayanan publik, menegakkan Perda melalui pembinaan dan pendataan, meningkatkan monitoring harga dan kesediaan sembako, mengembangkan promosi dan informasi harga;
4. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumberdaya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur;

5. Melestarikan SDA, lingkungan dan sumber daya perairan yang berkelanjutan meliputi pengendalian dan rehabilitasi kerusakan, mengedepankan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam antisipasi penanggulangan bencana dan pencemaran, pemulihan dan pendayagunaan ekosistem;
6. Meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah khususnya dalam bidang infrastruktur dan sarana prasarana daerah.

BAB IV**KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH****4.1 Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2021**

Estimasi penerimaan daerah pada APBD Perubahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan dari rencana target murni tahun 2021 sebesar Rp.2.348.725.928.936.,00,-. menjadi Rp.2.518.517.367.205,-. Berarti terjadi perubahan sebesar Rp.169.791.438.269,00,-. Perubahan tersebut terjadi pada sektor Pendapatan Asli Daerah, Sektor Pendapatan Transfer dan pada sektor Lain-lain pendapatan yang Sah. Secara rinci perbandingan target penerimaan daerah Kabupaten Kampar pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 1: Target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD T.A. 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	252.157.288.694	245.457.666.905	(6.699.621.789)
4.1.01	Pajak Daerah	125.546.192.000	120.613.003.373	(4.933.188.627)
4.1.02	Retribusi Daerah	13.807.959.365	12.032.240.000	(1.775.719.365)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.206.794.629	27.946.502.794	2.739.708.165
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	87.596.342.700	84.865.920.738	(2.730.421.962)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.096.568.640.242	2.161.245.800.300	64.677.160.058
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.968.671.884.429	1.986.346.277.705	17.674.393.276
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.896.755.813	174.899.522.595	47.002.766.782
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	111.813.900.000	111.813.900.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	111.813.900.000	111.813.900.000
	Jumlah Pendapatan	2.348.725.928.936	2.518.517.367.205	169.791.438.269

Arah kebijakan pendapatan daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 adalah :

- a. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dengan tetap berpihak pada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan kebijakan sebagai berikut :
- 1) Melakukan optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi, untuk semua jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 2) Melakukan kajian dan penghitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial.
 - 3) Melakukan pembinaan dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat atau wajib pajak terkait pajak daerah dan retribusi daerah, untuk meningkatkan pemahaman pajak guna mengoptimalkan penerimaan daerah, serta melakukan himbauan baik secara langsung kepada Wajib Pajak, maupun melalui Spanduk, Baliho, Media Massa (Koran, Radio) dan Media Sosial.
 - 4) Melakukan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) secara Online, serta penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Aplikasi SIMPAD.
 - 5) Memberikan Stimulus kepada Wajib Pajak berupa pembebasan denda untuk pembayaran PBB - P2 masa pajak periode Tahun 1995 s/d 2020.
 - 6) Memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk pembayaran Pajak Daerah, melalui Teller Bank Riaukepri, ATM Bank Riaukepri, sedangkan untuk pembayaran PBB - P2 diberi tambahan kemudahan melalui Aplikasi Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Indomaret, Alfamart, Gopay, Link Aja dan I-Saku.
 - 7) Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - 8) Melakukan kajian terhadap jenis penerimaan baru sebagai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha dan masyarakat, serta

tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 9) Melakukan perjanjian kerja antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan Kejaksaan Negeri Bangkinang tentang pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya dalam bidang pajak daerah, bidang perdata dan tata usaha negara kepada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar.
- b. Memaksimalkan perolehan Pendapatan Transfer dengan kebijakan sebagai berikut :
 - 1) Ekstensifikasi dan Intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan (PBB-P3), serta Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
 - 2) Mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Kampar tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah di Kabupaten Kampar .
 - 3) Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kampar selaku Daerah penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi (MIGAS) dan sumberdaya alam lainnya bersama Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah/Kementerian terkait;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru.
 - 5) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - 6) Melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait peningkatan penerimaan Transfer Antar Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok.
 - 7) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk peningkatan penerimaan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.

- e. Mengoptimalkan perolehan Lain-lain Pendapatan yang Sah melalui kebijakan :

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah/Instansi terkait dalam rangka peningkatan penerimaan alokasi pendapatan Hibah.

4.2 Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula ditargetkan sebesar **Rp. 252.157.288.694,00** pada APBD Perubahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.245.457.666.905,00**. Sehingga terjadi perubahan sebesar **Rp.6.699.621.789,00** atau turun **2,66** persen. Perubahan ini terjadi pada pos Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

A. Pajak Daerah.

Pada Sektor Pajak Daerah mengalami perubahan dari **Rp.125.546.192.000,00** menjadi **Rp.120.613.003.373,00** atau turun sebesar **Rp.4.933.188.627,00,-** atau **3,93** persen.

B. Retribusi Daerah.

Selanjutnya pada sektor Retribusi Daerah mengalami perubahan dari **Rp.13.807.959.365,00** menjadi **Rp.12.032.240.000,00** atau turun sebesar **Rp.1.775.719.365,00** atau **12,86** persen. Perubahan ini terjadi pada Retribusi Jasa Umum turun sebesar **Rp.601.091.365,00** atau **15,19** persen, Retribusi Jasa Usaha turun sebesar **Rp.174.628.000,00** atau **9,44** persen dan Retribusi Izin tertentu turun sebesar **Rp.1.000.000.000,00** atau **12,50** persen.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami perubahan target dari **Rp.25.206.794.629,00,-** menjadi **Rp.27.946.502.794,00,-** naik sebesar **Rp.2.739.708.165,00,-** atau **10,87** persen. Perubahan ini terjadi pada pos Penerimaan dari Bank Riau Kepri Cab. Bangkinang (Deviden) terjadi perubahan target dari **Rp.20.536.650.000,00,-** menjadi **Rp.26.607.519.974,00,-** naik sebesar **Rp.6.070.869.974,-**

atau 29,56 persen. untuk PT. Bumi Siak Pusako (BSP) turun dari Rp.4.200.000.000,00- menjadi Rp.1.308.982.820,00- turun Sebesar Rp.2.891.017.180,00,-. Atau 68,83 persen. untuk PD. Kampar Aneka Karya (KAK) tidak terjadi perubahan target atau tetap sebesar Rp.30.000.000,-. Sedangkan PDAM Tirta Kampar dan BPR Syariah Fadhilah Air Tiris untuk APBD Perubahan 2021 tidak ditargetkan,.

D. Lain - lain PAD yang Sah.

Pada Sektor Lain-lain PAD yang Sah terjadi perubahan target dari **Rp.87.596.342.700,00,-** menjadi **Rp.84.865.920.738,00,-** turun sebesar **Rp.2.730.421.962,00,-** atau **3,12** persen. Perubahan ini terjadi pada pendapatan BLUD dari Rp.56.000.000.000,00,- menjadi Rp.58.600.000.000,00,- naik sebesar Rp.2.600.000.000,00,- atau 4,05 persen. Kemudian Dana Non Kapitasi mengalami perubahan atau turun sebesar Rp.300.000.000,00,-. Sedangkan Dana Kapitasi JKN pada FKTP mengalami perubahan dari Rp.22.996.342.700,00,- menjadi Rp.23.099.055.855,00,- naik sebesar Rp.102.713.155,00,- atau 0,45 persen. Selanjutnya untuk Pendapatan Bunga Deposito pada perubahan 2021 tidak ditargetkan. Untuk Pendapatan Jasa Giro tetap sebesar Rp.2.500.000.000,00,-.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan dari **Rp.2.096.568.640.242,00** menjadi **Rp.2.161.245.800.300,00** turun sebesar **Rp.64.677.160.058,00**, dengan rincian sebagai berikut :

A. Transfer Pemerintah Pusat.

Transfer Pemerintah Pusat mengalami perubahan dari Rp.1.968.671.884.429,00 menjadi Rp.1.986.346.277.705,00 naik sebesar Rp.17.674.393.276,00 .

B. Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Bagi Hasil terjadi perubahan sebesar Rp.127.896.755.813,00 menjadi Rp.174.899.522.595,00 naik sebesar Rp.47.002.766.782,00 atau 36,75 persen.

4.2.2 Laju Laju Penyalangan Daerah yang Baik

Salah satu Laju Laju Penyalangan Daerah yang Baik, yaitu pada akhir pemerintahan Hilah pada tahun sebelumnya tidak ada pemerintahan, namun pada 2000 pemerintah tahun 2001 diorganisasikan sebagai Rp. 111.812.000.000,00.

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Perencanaan Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang/pendukung yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, perubahan belanja daerah tahun 2021 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Secara umum kebijakan belanja daerah tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pencapaian target dengan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Sedangkan kebijakan alokasi belanja tidak langsung dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memelihara hasil-hasil pembangunan, serta untuk menciptakan tabungan pemerintah daerah melalui usaha penghematan dan efisiensi pengeluaran, dengan catatan bahwa efisiensi dan penghematan belanja tidak langsung tersebut tidak akan mengganggu kelancaran tugas satuan/unit kerja daerah.

Perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD 2021 antara lain dipengaruhi oleh;

- 1) perubahan kebijakan belanja yang disebabkan oleh peraturan perundangan menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran belanja antar program, kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran belanja antar kelompok belanja yang mengharuskan terpenuhinya mandatory yang merupakan kewajiban daerah;
- 2) perubahan kebijakan belanja dengan melakukan rasionalisasi dan formulasi ulang terhadap kegiatan yang tidak prioritas.
- 3) Perubahan karena adanya varian SILPA. Perubahan dilakukan karena perkiraan atas SILPA tidak sesuai;
- 4) Perubahan karena adanya pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran dapat terjadi dalam satu OPD, meskipun total alokasi untuk OPD yang bersangkutan tidak berubah;
- 5) Karena adanya perubahan dalam penerimaan, khususnya pendapatan. Perubahan target atas pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja perubahan pada tahun yang sama. Pada saat penyusunan APBD murni, target PAD ditetapkan di bawah potensi, lalu dilakukan adjustment pada saat melakukan perubahan APBD.
- 6) Adanya perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Riau sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2020

Kebijakan terkait dengan perubahan belanja daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. pengalokasian belanja untuk pemenuhan mandatory spending yang diatur oleh peraturan perundangan dan yang telah ditetapkan peruntukannya (earmark);
2. menampung kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri (SPN) Reguler
3. pengalokasian anggaran belanja transfer dari bantuan keuangan propinsi untuk kabupaten Kampar;
4. melakukan refocusing anggaran untuk mendanai penanggulangan Covid 19 di Kabupaten Kampar;
5. melakukan pengurangan belanja pada program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 disebabkan berkurangnya dana transfer

Perubahan atas alokasi anggaran belanja merupakan bagian terpenting dalam perubahan. Perubahan dalam pembiayaan terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD harus direvisi. Ketika besaran realisasi surplus/defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan, setidaknya untuk mengkoreksi penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).

SILPA tahun berjalan merupakan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan) tahun lalu. Oleh karena itu, SILPA merupakan penerimaan pada awal tahun berjalan. Namun, besaran yang diakui pada saat penyusunan APBD masih bersifat taksiran, belum definitif, karena (a) pada akhir tahun lalu tersebut belum seluruh pertanggungjawaban disampaikan oleh SKPD ke BUD dan (b) BPK belum menyatakan bahwa jumlah SILPA sudah sesuai dengan yang sesungguhnya.

Selisih (variance) antara SILPA dalam APBD tahun berjalan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja. Jika diterapkan konsep anggaran berimbang (penerimaan sama dengan pengeluaran atau SILPA bernilai nol atau nihil), maka varian SILPA akan menyebabkan perubahan alokasi belanja. Gambaran selengkapnya tentang Perubahan APBD Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut.

5.1 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Untuk menunjang pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam APBD, belanja daerah terbagi dalam klasifikasi belanja daerah sebagai berikut: 1) belanja operasi, 2) belanja modal, 3) belanja transfer dan 4) belanja tidak terduga. Perubahan belanja daerah tercantum pada tabel berikut:

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Hertambah / (Berkurang)
5	BELANJA	2.404.990.072.502,00	2.624.760.414.382,00	219.770.341.880,00

Dari tabel dijelaskan terlihat perubahan belanja sebagai berikut:

1) Belanja operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari, yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja operasi dianggarkan untuk membiayai belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

2) Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

3) Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran. APBD Kabupaten Kampar setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup dengan Pembiayaan Netto.

6.1 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan digunakan dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penerimaan pembiayaan pada APBD 2021 mengalami perubahan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK perwakilan Propinsi Riau terhadap Laporan Hasil Pertanggungjawaban APBD tahun 2020 terutama terhadap pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun 2020. Perubahan penerimaan ini mempengaruhi terhadap jumlah defisit anggaran yang harus ditutupi oleh SiLPA tahun 2021. Perencanaan Perubahan APBD tahun 2021 mengalami defisit disebabkan perencanaan belanja lebih besar dari pendapatan daerah. Untuk menutupi defisit digunakan penerimaan pembiayaan dengan kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang didanai dari SiLPA tahun 2020

2. Melakukan penelitian penelitian tentang Perencanaan Kerja
Jumlah dan Perencanaan Kapasitas (KAP) dengan melakukan penelitian
pada tingkat pada PT. Bina Karya.

4.1.1. Kebijakan perubahan penggunaan penitipan

Penggunaan penitipan secara umum adalah semua penggunaan yang perlu
diperhatikan adalah baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran sebelumnya dan dipengaruhi antara lain oleh
APBN. (dalam APBN tahun 2011) Perencanaan Kelengkapan Kerja akan
melakukan penggunaan penitipan.

2. Melakukan penerimaan pembiayaan melalui Pemerintah Kembali Investasi Non Permanen kepada BKMD dengan melakukan penarikan dana bergilir pada PT Bank Sarawak.

4.3 Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang perlu dierimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Dalam APBD tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan pengeluaran pembiayaan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Perubahan Kebijakan umum secara langsung akan mempengaruhi terhadap target dan sasaran dari prioritas APBD tahun 2021. Untuk pencapaian perubahan kebijakan umum APBD tahun 2021 pemerintah daerah Kabupaten Kampar melakukan strategi pencapaian yang terukur yang menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten Kampar menjalankan APBD sampai akhir tahun anggaran. Strategi pencapaian meliputi pencapaian kebijakan umum perubahan pendapatan, pencapaian kebijakan umum perubahan belanja dan kebijakan umum perubahan pembiayaan.

Strategi pencapaian pendapatan daerah secara umum adalah Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dengan tetap berpihak pada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan melakukan strategi kebijakan sebagai berikut :

- Melakukan optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi, untuk semua jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Memaksimalkan perolehan Pendapatan Transfer dengan strategi memenuhi segala hal yang menjadi bahan persyaratan penyaluran dana transfer daerah;
- Mengoptimalkan perolehan Lain-lain Pendapatan yang Sah melalui strategi kebijakan melakukan koordinasi dengan Pemerintah/Instansi terkait dalam rangka peningkatan penerimaan alokasi pendapatan Hibah.

Strategi pencapaian belanja daerah adalah melakukan:

- Mempercepat penyerapan anggaran untuk pencapaian sasaran program kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas ;
- Melaksanakan kegiatan yang menjadi mandatory spending sebagai wujud ketaatan terhadap peraturan peundang-undangan.

PENUTUP.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

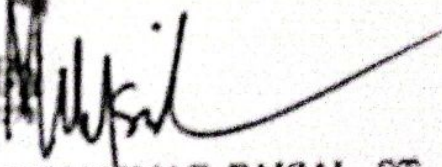
Bangkinang, 17 September 2021

BUPATI KAMPAR
Selaku,
PIHAK PERTAMA

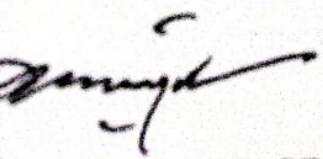


CATUR SUGENG SUSANTO

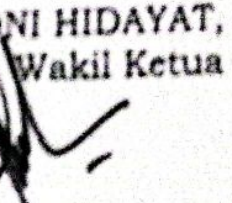
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
Selaku,
PIHAK KEDUA



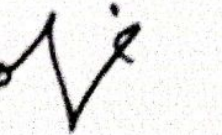
MUHAMMAD FAISAL, ST
Ketua



ONI HIDAYAT, SE
Wakil Ketua



REPOL, S.Ag
Wakil Ketua



FAHMIL, SE
Wakil Ketua